



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) 2022

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
KATA PENGANTAR .....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. LATAR BELAKANG .....	5
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 .....	14
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022 .....	15
C. PERJANJIAN KINERJA 2022 .....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 .....	18
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 .....	42
BAB IV PENUTUP .....	44
A. KESIMPULAN .....	44
B. SARAN .....	44
LAMPIRAN .....	45



## DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal.
1	Sasaran Strategis	15
2	Rencana Kinerja Tahun 2022	15
3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
4	Keadaan Perkara sebagai Tingkat Banding	19
5	Rekapitulasi Jumlah Perkara yang mengajukan Kasasi 2022	20
6	Sisa Perkara Th. 2022 yang diselesaikan di Th. 2023	21
7	Jumlah Perkara yang Diputus tepat waktu sebagi Tingkat Banding	22
8	Sasaran Strategis 1	22
8.1	Capaian Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu di Tahun 2020 s/d 2022	31
8.2	Rekapitulasi Perkara yang mengajukan Kasasi tahun 2022	31
8.3	Capaian Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Di Tahun 2020 s/d 2022	32
9	Sasaran Strategis 2	33
9.1	Capaian Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak / pengadilan pengaju tepat waktu di Tahun 2020 s/d 2022	35
10	Sasaran Strategis 3	35
10.1	Capaian Persentase Pembinaan ke daerah di Tahun 2020 s/d 2022	38
11	Sasaran Strategis 4	38
11.1	Capaian Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Th. 2020 s/d 2022	39
11.2	Capaian Persentase Pengawasan Th. 2020 s/d 2022	39
12	Realisasi Anggaran DIPA 01 Th. 2020 s/d 2022	42
13	Realisasi Anggaran DIPA 05 Th. 2020 s/d 2022	43
14	Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	43



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal.
1	Penyelesaian Perkara tingkat Banding tepat waktu	23
2	Capture Hasil Survey IKM 2022 di website PTTUN Surabaya	33
3	Bukti Pengiriman salinan putusan secara digital di Aplikasi SIPP	34
4	Foto Salah satu Kegiatan Pembinaan tahun 2022	37
5	Laporan Tahunan Penanganan Pengaduan	38
6	Foto Salah satu Kegiatan Pengawasan tahun 2022	18



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tahun 2022 ini.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (voorpost) dari Mahkamah Agung RI, dimana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya meliputi daerah hukum Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan amanat yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 14, 27 dan 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, oleh karenanya pengukuran kinerja, evaluasi dan pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja adalah merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh karena dari ketiga hal tersebut akan dapat diperoleh informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

LKjIP disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing instansi pemerintah pada tahun berjalan, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan serta akuntabel di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Surabaya, 17 Februari 2023  
Ketua



Dr. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.  
NIP. 19571011 198503 1 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Permen PAN dan RB Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
4. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bertujuan untuk melaporkan “Pencapaian Kinerja” (Performance Result) selama tahun 2022 yang dibandingkan dengan “Rencana Kinerja” (Performance Plan) tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada “Rencana Strategis” (Strategic Plan) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 2020 – 2024.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan kualitas SDM.
4. Peningkatan kualitas Pengawasan.

Pencapaian hasil kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam kurun waktu tahun 2022 telah berusaha memenuhi / mencapai 4 (empat) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target, dengan terlebih dahulu merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan pencapaiannya.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

<b>Sasaran Strategis I</b>			
<b>Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	45%	55,84%	124,09%
c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%	88,48%	110,6%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I</b>			<b>115,27%</b>

<b>Sasaran Strategis II</b>			
<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	90%	100%	111,11%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II</b>			<b>111,11%</b>





## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa :

**“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”**

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

**“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”**

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.

Sementara itu dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

**“Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”**

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagai pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Renstra 5 (lima) tahunan Tahun 2020 – 2024.

Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2022 dilakukan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tahun yang akan datang.

## **B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai berikut :

### **1. Kedudukan**

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bila timbul benturan kepentingan, perselisihan/sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

### a. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan eksekusi;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan dan Pelaporan, Kepegawaian dan TI, Rencana Program dan Anggaran);
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum Tata Usaha Negara, pelayanan riset/penelitian;

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat kekhususan, dimana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disamping sebagai Pengadilan Tingkat Banding juga bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 48.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

**(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / administrasi yang tersedia.**

**(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.**

Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.**

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Pebruari 1993 adalah merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993, meliputi daerah propinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara yang dimintakan Pemeriksaan Banding oleh para pencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu dari :

- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
- Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
- Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

- Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
- Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Disamping itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan :

- Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai tingkat pertama dan terakhir;
- Sengketa yang telah melalui upaya administrative, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan dan Pelaporan, Kepegawaian dan TI, Rencana Program dan Anggaran);
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum Tata Usaha Negara, pelayanan riset / penelitian.

Di samping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada **Standar Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah dievaluasi pada tanggal 14 Januari 2017 seiring dengan diterimanya

**Sertifikasi ISO 9001:2015** oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Mei 2017. Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang **Pelayanan Publik** yang memuat antara lain sebagai berikut :

- Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
- Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
- Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
- Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Tersedianya system pengelolaan organisasi;
- Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Tidak kalah penting dari diterimanya **Sertifikasi ISO 9001:2015**, adalah hasil penilaian oleh Tim Auditor Eksternal (Asesor) yang dilaksanakan sejak tanggal 31 Agustus s/d 02 September 2022 dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2022, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh nilai **“A (Exellent)”**.

Untuk saat ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beserta seluruh wilayah hukumnya sedang berjuang membangun komitmen bersama untuk mewujudkan **Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

**Kondisi-kondisi** tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi **yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)** yang menjadi salah satu tujuan **Reformasi Birokrasi**.

### 3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dibantu oleh Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan, Hakim Tinggi dan Panitera/Sekretaris.

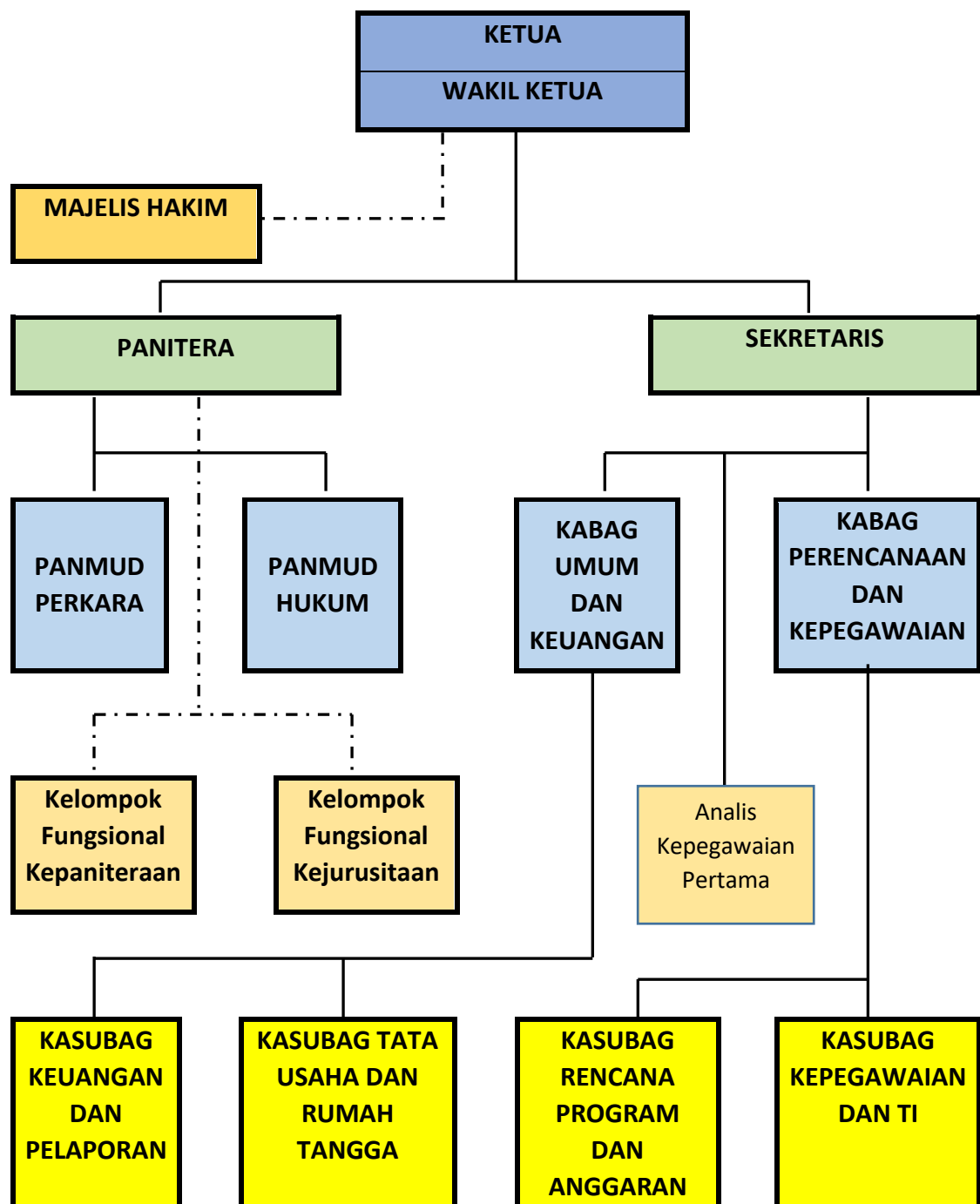
Seiring dengan terjadinya perubahan struktur di Mahkamah Agung RI yang ditandai adanya pemisahan antara Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung RI, hal itu juga berlaku pada badan peradilan di empat lingkungan peradilan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, adalah sebagai berikut :

- 1) Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
- 2) Hakim Tinggi adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman;
- 3) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya dipimpin oleh seorang Panitera;
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh 2 (dua) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum, disamping itu juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti;
- 5) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dipimpin oleh seorang Sekretaris;
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Umum dan Keuangan serta Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;

- 7) Kepala Bagian Umum dan Keuangan, dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga serta Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
- 8) Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tehnologi Informasi;

Adapun struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, seperti tergambar di bawah ini :





Keterangan :

———— = Garis Komando / Perintah (Administrasi/Manajemen Peradilan)

- . - . - = Garis Koordinasi (Tehnis Peradilan)

#### **4. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tahun 2022. Capaian kinerja (performance result) 2022 tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya disusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang organisasi yang berisikan aspek strategis organisasi dengan potensi dan permasalahan utama, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dan sistematika penyajian ;

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang ikhtisar perjanjian kinerja yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama ;

Bab III : Akuntabilitas kinerja berisikan tentang capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran tahun 2022;

Bab IV : Penutup berisikan kesimpulan dan langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

**V i s i** adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Adapun **Visi** dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah :

#### **“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yang Agung”**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, menetapkan **M i s i** yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Rumusan **tujuan strategis** tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
2. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menetapkan **sasaran strategis**, sebagai berikut :

**Tabel 1**  
Sasaran Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu
3.	Peningkatan kualitas SDM	Persentase Pembinaan ke daerah
4.	Peningkatan kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase Pengawasan ke daerah

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2**  
Rencana Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	45%
		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak / pengadilan pengaju tepat waktu	90%
3.	Peningkatan Kualitas SDM	Persentase Pembinaan ke daerah	100%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase Pengawasan ke daerah	100%

### C. PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai berikut :

**Tabel 3**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	45%
		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	90%
3.	Peningkatan Kualitas SDM	Persentase Pembinaan ke daerah	100%
4.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase Pengawasan ke daerah	100%



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini.

Untuk memudahkan dalam melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tahun 2022, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu keadaan perkara dan penyelesaiannya, sebagai berikut :

#### 1. Keadaan Perkara

##### a. Keadaan Perkara sebagai Tingkat Pertama

Penyelenggaraan Pemilu memiliki potensi menimbulkan setidaknya empat macam permasalahan yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, perselisihan administrasi pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Dalam hal timbul sengketa administrasi pemilu maka instansi yang berwenang menyelesaikannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan dibatalkannya pasal 236 C Undang-Undang No. 12 Thn. 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Pasal 29 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 48 Thn. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penanganan sengketa Pilkada cukup dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama nya.

Selama tahun 2022, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa Pilkada, sehingga tidak ada laporan yang dapat disajikan mengenai keadaan perkara tingkat pertama. Hal ini disebabkan tidak ada Pemilukada di tahun 2022 ini.

b. Keadaan Perkara sebagai Tingkat Banding

Pada tahun 2022, perkara banding yang masuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 196 Perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2021 yang belum diselesaikan sejumlah 15 Perkara, sehingga beban perkara yang harus diselesaikan di tahun 2022 adalah sejumlah 211 Perkara.

Dari keseluruhan perkara di tahun 2022 sejumlah 211 Perkara, telah diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 197 Perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus di tahun 2022 adalah sejumlah 14 Perkara.

Berikut dapat digambarkan keadaan perkara tingkat banding di tahun 2022 dalam matriks tabel di bawah ini :

**Tabel 4**  
Keadaan Perkara sebagai Tingkat Banding

No	Klasifikasi	Sisa di Th. 2021	Masuk di Th. 2022	Jumlah Beban	Putus di Th. 2022	Sisa di Th. 2022
1	Pertanahan	5	82	87	79	8
2	Kepegawaian	1	10	11	11	0
3	Perijinan	0	5	5	5	0
4	Lingkungan Hidup	0	2	2	2	0
5	Tender	0	4	4	4	0
6	Badan Hukum Parpol	0	0	0	0	0
7	Kades dan Perangkat Desa	0	2	2	0	2
8	Kepala Daerah	0	0	0	0	0
9	Proses Pemilu	0	0	0	0	0
10	PAW	0	0	0	0	0

11	Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0
12	KIP	0	0	0	0	0
13	Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0
14	Fiktif Positif	0	0	0	0	0
15	Penyalagunaan wewenang	0	0	0	0	0
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	0	2	2	0	2
17	Lelang	0	6	6	6	0
18	Lain Lain	9	83	92	90	2
	Jumlah	15	196	211	197	14

c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Untuk permohonan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara yang diterima di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan untuk diselesaikan di tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung RI di tahun 2022 ini, adalah sebagai berikut :

1) Sebagai Tingkat Pertama

Dalam hal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk penyelesaian perkara Pilkada di tahun 2022 tidak ada perkara Pilkada yang masuk dikarenakan tidak adanya Pemilukada di tahun 2022, sehingga tidak ada laporan yang dapat disajikan.

2) Sebagai Tingkat Banding

Dalam hal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Banding untuk penyelesaian perkara di wilayah hukumnya, dapat digambarkan dalam matriks berikut ini :

**Tabel 5**  
Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Mengajukan Kasasi Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	42
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	12
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	0
4.	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	8
5.	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	9
6.	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	16
	<b>Jumlah Total</b>	<b>87</b>



## 2. Penyelesaian Perkara

### a. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Sebagaimana telah diuraikan diatas dari keseluruhan perkara di tahun 2022 sejumlah 211 Perkara, telah diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 197 Perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus di tahun 2022 adalah sejumlah 14 Perkara.

**Tabel 6**  
Sisa Perkara Th. 2022 yang Diselesaikan di Th. 2023

No.	NOMOR PERKARA TINGKAT BANDING	NOMOR PERKARA TINGKAT PERTAMA	NO. PERKARA KASASI / TGL PERMOHONAN KASASI	NO. PERKARA PK / TGL PERMOHONAN PK	KETERANGAN
1.	172/B/2022/PTTUN.SBY	32/G/2022/PTUN.SMG	-	-	Pertanahan
2.	184/B/2022/PTTUN.SBY	93/G/2022/PTUN.SBY	-	-	Lain-lain
3.	185/B/2022/PTTUN.SBY	91/G/2022/PTUN.SBY	-	-	Pertanahan
4.	186/B/2022/PTTUN.SBY	40/G/2022/PTUN.SMG	-	-	Pertanahan
5.	187/B/2022/PTTUN.SBY	84/G/2022/PTUN.SBY	-	-	Pertanahan
6.	188/B/2022/PTTUN.SBY	109/G/2022/PTUN.SBY	-	-	Kades dan Perangkat Desa
7.	189/TF/2022/PTTUN.SBY	68/G/TF/2022/PTUN.SBY	-	-	Tindakan Administrasi pemerintahan
8.	190/B/2022/PTTUN.SBY	90/G/2022/PTUN.SBY	-	-	Lain lain
9.	191/B/2022/PTTUN.SBY	31/G/2022/PTUN.MTR	-	-	Pertanahan
10.	192/B/2022/PTTUN.SBY	6/G/2022/PTUN.KPG	-	-	Pertanahan
11.	193/TF/2022/PTTUN.SBY	8/G/TF/2022/PTUN.YK	-	-	Tindakan Administrasi pemerintahan
12.	194/B/2022/PTTUN.SBY	95/G/2022/PTUN.SBY	-	-	Kades dan Perangkat Desa
13.	195/B/2022/PTTUN.SBY	100/G/2022/PTUN.SBY	-	-	Pertanahan
14.	196/B/2022/PTTUN.SBY	50/G/2022/PTUN.SBY	-	-	Pertanahan

### b. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Dari keseluruhan perkara yang diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Tahun 2022, telah diselesaikan dan diputus tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

**Tabel 7**  
Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu sebagai Tingkat Banding

No	Wil. Pengadilan Tinggi	Rentang Waktu Memutus				Ket
		1-3 Bulan	3-6 Bulan	6-12 Bulan	>12 Bulan	
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	√	--	--	--	Perkara yang diputus sejumlah 197 perkara

c. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Dari keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Tingkat Banding dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut :

- Perkara yang diputus di tingkat banding sejumlah 197 Perkara;
- Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 87 Perkara;
- **Jadi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 110 Perkara;**

Dari keadaan perkara dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut jika dihubungkan dengan Sasaran Strategis berikut indikatornya maka akan diketahui capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjalankan fungsi peradilan pada tahun 2022. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

**1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

**Tabel 8**  
Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45%	55,84%	124,09%
c. Index perepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%	88,48%	110,6%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1</b>			<b>115,27%</b>

**a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah perbandingan antara Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berjalan dengan Jumlah Perkara Yang Ada.

Sebagai Tingkat Pertama :

Selama tahun 2022 tidak ada kegiatan Pemilukada, sehingga secara otomatis tidak ada perkara Pilkada yang masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Sebagai Tingkat Banding :

Secara keseluruhan jumlah perkara banding yang masuk di tahun 2022 adalah sejumlah 196 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2021 sebanyak 15 perkara, sehingga menjadi sejumlah 211 perkara.

Dari 211 perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan sejumlah 197 perkara termasuk didalamnya sisa perkara tahun 2021, sedangkan sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus di tahun 2022 adalah sejumlah 14 perkara.

Berikut tampilan hasil rekapitulasi dari Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang menunjukkan bahwa seluruh perkara banding sejumlah 197 perkara telah diselesaikan tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, tidak melebihi batas waktu 3 bulan.

**Gambar 1**  
Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Tepat Waktu  
(Rekapitulasi)

NO.	ASAL PENGADILAN	PEMOHON BANDING	NO. PRK. TK. I	JENIS PERKARA	TGL. REGISTRASI	NO. PRK. BANDING	LAMA PROSES	STATUS PRK. TK. BANDING
1	TUN SURABAYA	Pembanding : HARIYANI Terbanding : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATUIr. ENDAH SUSILANINGTYAS	eCourt 52/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	08 Nov. 2021	233/B/2021/PT.TUN.SBY	66 hari	Minutasi Tgl. : 13 Jan. 2022
2	TUN SEMARANG	Pembanding : SuprayitnoSuhartoSumarsonoSuparjo Terbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara	eCourt 51/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	29 Nov. 2021	238/B/2021/PT.TUN.SBY	44 hari	Minutasi Tgl. : 12 Jan. 2022
3	TUN SURABAYA	Pembanding : ULVA atau ULFA atau MUASSOMAHMASTIKAH atau MASTICHAH.SITI CHAMIDAH SIDIKNUR DJAMILAHD.JAUHARA NISHFI LAILIBAHARA ISBALA SHOBHAZHARA AISARA HAWASUDARTIKM.ISMAILMOCHAMAD YUNUSMOCH. IMAM SAFTIMARSIADI Terbanding : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA IDJERMAN PRASETYAWAN, AMD	eCourt 51/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	06 Des. 2021	240/B/2021/PT.TUN.SBY	37 hari	Minutasi Tgl. : 12 Jan. 2022
4	TUN SURABAYA	Pembanding : Syaifulah Terbanding : Gubernur Jawa TimurBupati Bondowoso	eCourt 42/G/2021/PTUN.SBY	Kepegawaian	08 Des. 2021	241/B/2021/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasi Tgl. : 13 Jan. 2022
5	TUN KUPANG	Pembanding : KEPALA DESA LAMAWALANG KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR Terbanding : HERIBERTUS UA DAWANGILL ROSSY MARTINS	eCourt 16/G/2021/PTUN.KPG	Lain-Lain	08 Des. 2021	242/B/2021/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasi Tgl. : 18 Jan. 2022
6	TUN MATARAM	Pembanding : LALU MUJITABE Terbanding : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA , DESA JEMBATAN KEMBAR TIMUR KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT	eCourt 23/G/2021/PTUN.MTR	Lain-Lain	08 Des. 2021	243/B/2021/PT.TUN.SBY	34 hari	Minutasi Tgl. : 11 Jan. 2022
7	TUN SEMARANG	Pembanding : USWATUN KHASANAHTerbanding : KEPALA DESA TUNGU RiyantoAlfiatur RohmaniyahAhmad Thohir	eCourt 63/G/2021/PTUN.SMG	Lain-Lain	08 Des. 2021	244/B/2021/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasi Tgl. : 19 Jan. 2022
8	TUN DENPASAR	Pembanding : I Nyoman Rudang Terbanding : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASARPARMA BUN HWIESOFIAN TEGUH SANTOSO	eCourt 8/G/2021/PTUN.DPS	Pertanahan	13 Des. 2021	245/B/2021/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasi Tgl. : 24 Jan. 2022

9	TUN SURABAYA	Pembanding : CV. SURYA KENCANA FOODTerbanding : KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR	eCourt 69/G/2021/PTUN. SBY	Lain-Lain	15 Des. 2021	246/B/2021/PT.TUN.SBY	54 hari	Minutasi Tgl. : 07 Feb. 2022
10	TUN SURABAYA	Pembanding : SITUMTerbanding : KEPALA DESA LAWAK	eCourt 74/G/2021/PTUN. SBY	Lain-Lain	15 Des. 2021	247/B/2021/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasi Tgl. : 25 Jan. 2022
11	TUN SURABAYA	Pembanding : TEGUH DIGDAYANTOTerbanding : KECAMATAN TEGALSARI	eCourt 75/G/2021/PTUN. SBY	Lain-Lain	15 Des. 2021	248/B/2021/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasi Tgl. : 12 Jan. 2022
12	TUN MATARAM	Pembanding : Prof. Dr. ABDUL AZIZ SANAPIAHJI, Nur Ainun Susanti, AMKAbdul Maula Sanapih, S.SOS. Terbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa BaratDra. NURMA S. IBRAHIM	eCourt 24/G/2021/PTUN. MTR	Pertanahan	15 Des. 2021	249/B/2021/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasi Tgl. : 13 Jan. 2022
13	TUN MATARAM	Pembanding : ADI SALMAN, S.H.Terbanding : Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok BaratPanitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan	eCourt 22/G/2021/PTUN. MTR	Lain-Lain	15 Des. 2021	250/B/2021/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasi Tgl. : 12 Jan. 2022
14	TUN SEMARANG	Pembanding : Imam ShoffiTerbanding : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus	eCourt 64/G/2021/PTUN. SMG	Lain-Lain	20 Des. 2021	251/B/2021/PT.TUN.SBY	23 hari	Minutasi Tgl. : 12 Jan. 2022
15	TUN SURABAYA	Pembanding : HJ. SITI ZUBAIDAH KASFAH Binti MATSARISITI ROJANAH Binti MATSARITerbanding : KEPALA KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MOJOKERTOPEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO	eCourt 50/G/2021/PTUN. SBY	Pertanahan	20 Des. 2021	252/B/2021/PT.TUN.SBY	45 hari	Minutasi Tgl. : 03 Feb. 2022
16	TUN YOGYAKARTA	Pembanding : PT Bahana Makmur UtamaTerbanding : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten) Mangsen-Prpiph Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kulon ProgoKepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	eCourt 8/G/2021/PTUN. YK	Tender	03 Jan. 2022	1/B/2022/PT.TUN.SBY	32 hari	Minutasi Tgl. : 04 Feb. 2022

17	TUN KUPANG	Pembanding : Isfridus SotaBonevasius YudentTerbanding : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMURPT. ISTINDO MITRA MANGGARAI	eCourt 5/GLH/2021/PTU N.KPG	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan (Mineral,Batu Bara). Minyak dan Gas Bumi	03 Jan. 2022	2/B/LH/2022/PT.TUN.SBY	58 hari	Minutasi Tgl. : 02 Mar. 2022
18	TUN MATARAM	Pembanding : kepala badan pertanahan nasional lombok baratTerbanding : H. MAS'UDNURUL HIDAYAH, S. PdLALU MAHENDRASANA' AHMAHMUDAH	eCourt 20/G/2021/PTUN. MTR	Pertanahan	03 Jan. 2022	3/B/2022/PT.TUN.SBY	44 hari	Minutasi Tgl. : 16 Feb. 2022
19	TUN SEMARANG	Pembanding : AKHMAD AGUS IMAM SOBIRINTerbanding : Kepala Desa Turirejo, Kec. Jepon, Kab. Bora, Prov. Jawa TengahDEWI SETYORINI	eCourt 62/G/2021/PTUN. SMG	Lain-Lain	03 Jan. 2022	4/B/2022/PT.TUN.SBY	30 hari	Minutasi Tgl. : 02 Feb. 2022
20	TUN KUPANG	Pembanding : PENJABAT KEPALA DESA WULIWALOTerbanding : SILVESTER RAWU	eCourt 15/G/2021/PTUN. KPG	Lain-Lain	05 Jan. 2022	5/B/2022/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasi Tgl. : 16 Feb. 2022
21	TUN SURABAYA	Pembanding : SAMSUL ARIFINTerbanding : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA AROKMUHTAR ALFARUKI	eCourt 78/G/2021/PTUN. SBY	Lain-Lain	12 Jan. 2022	6/B/2022/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasi Tgl. : 17 Feb. 2022
22	TUN SURABAYA	Pembanding : KEPALA DESA NGULANWETANTerbanding : MARYANTOTurut Terbanding : SYAFRINDA IMAWAN	eCourt 102/G/2021/PTUN. SBY	Lain-Lain	17 Jan. 2022	7/B/2022/PT.TUN.SBY	24 hari	Minutasi Tgl. : 10 Feb. 2022
23	TUN SURABAYA	Pembanding/Terbanding : UNTUNG PURNOMOTerbanding : SOEHARYONOKepala Kantor Pertanahan Kota Batu	eCourt 72/G/2021/PTUN. SBY	Pertanahan	17 Jan. 2022	8/B/2022/PT.TUN.SBY	30 hari	Minutasi Tgl. : 16 Feb. 2022

24	TUN SEMARANG	Pembanding : ENI KUSMIYATITerbanding : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DINPMPTSP) KABUPATEN DEMAKANWAR ABDUL GHOFUR	eCourt 76/G/2021/PTUN. SMG	Perijinan	18 Jan. 2022	9/B/2022/PT.TUN.SBY	23 hari	Minutasi Tgl. : 10 Feb. 2022
25	TUN SEMARANG	Pembanding : CV. Sanfranco Anugrah MahkotaTerbanding : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	eCourt 80/G/2021/PTUN. SMG	Lelang	18 Jan. 2022	10/B/2022/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasi Tgl. : 15 Feb. 2022
26	TUN DENPASAR	Pembanding : Gwie Peter WinarsoTerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar	eCourt 11/G/2021/PTUN. DPS	Pertanahan	19 Jan. 2022	11/B/2022/PT.TUN.SBY	34 hari	Minutasi Tgl. : 22 Feb. 2022
27	TUN MATARAM	Pembanding : IRMA ZAIMATUDDUNITerbanding : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat	eCourt 13/G/2022/PTUN. MTR	Pertanahan	23 Agu. 2022	112/B/2022/PT.TUN.SBY	34 hari	Minutasi Tgl. : 26 Sep. 2022
28	TUN SURABAYA	Pembanding : PAIMINJUMADIPAERANTerbanding : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANGPT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA	eCourt 107/G/2021/PTUN. SBY	Pertanahan	19 Jan. 2022	13/B/2022/PT.TUN.SBY	35 hari	Minutasi Tgl. : 23 Feb. 2022
29	TUN SEMARANG	Pembanding : Desryan Dwira PratamaTerbanding : Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia	eCourt 83/G/2021/PTUN. SMG	Lain-Lain	26 Jan. 2022	14/B/2022/PT.TUN.SBY	43 hari	Minutasi Tgl. : 10 Mar. 2022
30	TUN SURABAYA	Pembanding : ILMIR ROFIQTerbanding : Bupati SidoarjoZAINAL ABIDIN	eCourt 100/G/2021/PTUN. SBY	Lain-Lain	26 Jan. 2022	15/B/2022/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasi Tgl. : 08 Mar. 2022
31	TUN SEMARANG	Pembanding : H. Sukawi Sutarip, S.E., S.H., M.H. Terbanding : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang Provinsi Jawa TengahTAN YANGKY TANUPUTRA	eCourt 77/G/2021/PTUN. SMG	Pertanahan	02 Feb. 2022	16/B/2022/PT.TUN.SBY	56 hari	Minutasi Tgl. : 30 Mar. 2022
32	TUN SURABAYA	Pembanding/Terbanding : Helin Ratna WiduriTerbanding : ALBERTUS BUDI SUTRISNOKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO	eCourt 76/G/2021/PTUN. SBY	Pertanahan	02 Feb. 2022	17/B/2022/PT.TUN.SBY	43 hari	Minutasi Tgl. : 17 Mar. 2022

33	TUN SEMARANG	Pembanding : AHMAD RIZAL SOFIANTerbanding : Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia	eCourt 78/G/2021/PTUN.SMG	Kepegawaian	07 Feb. 2022	18/B/2022/PT.TUN.SBY	63 hari	Minutasi Tgl. : 11 Apr. 2022
34	TUN MATARAM	Pembanding : PORO TUNRUJUNAITerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten SumbawaTurut Terbanding : SAFARUDDINM. JAFARJULIANHASANUDDIN	eCourt 30/G/2021/PTUN.MTR	Pertanahan	08 Feb. 2022	19/B/2022/PT.TUN.SBY	51 hari	Minutasi Tgl. : 31 Mar. 2022
35	TUN SURABAYA	Pembanding : CAMAT BENJENG, KABUPATEN GRESIKTerbanding : SUPARNO	eCourt 125/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	10 Feb. 2022	20/B/2022/PT.TUN.SBY	47 hari	Minutasi Tgl. : 29 Mar. 2022
36	TUN SURABAYA	Pembanding : BUDIANTOTerbanding : WALKOTAMADYA SURABAYA	eCourt 136/G/TF/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	10 Feb. 2022	21/B/TF/2022/PT.TUN.SBY	60 hari	Minutasi Tgl. : 11 Apr. 2022
37	TUN SURABAYA	Pembanding : SITI MARISATerbanding : Bupati Jember	eCourt 135/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	15 Feb. 2022	22/B/2022/PT.TUN.SBY	30 hari	Minutasi Tgl. : 17 Mar. 2022
38	TUN SEMARANG	Pembanding : PT. Sarana Bakti Utama (Diwakili oleh Ikhwan)Terbanding : POKJA Pemilihan 4 UKPBJ Pemerintah Kabupaten Pati	eCourt 84/G/2021/PTUN.SMG	Lelang	16 Feb. 2022	23/B/2022/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasi Tgl. : 30 Mar. 2022
39	TUN SURABAYA	Pembanding : DEWI ASKAHaji ABU ABDUL ROZAQTerbanding : KEPALA DESA BANJAR KEMUNINGPT. DIAN DELTA PROPERTY	eCourt 117/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	16 Feb. 2022	24/B/2022/PT.TUN.SBY	44 hari	Minutasi Tgl. : 01 Apr. 2022
40	TUN SURABAYA	Pembanding : Ir Supriyono SH MH CPCLETerbanding : BUPATI SIDOARJODIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA KABUPATEN SUDOARJO	eCourt 118/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	17 Feb. 2022	25/B/2022/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasi Tgl. : 30 Mar. 2022
41	TUN SEMARANG	Pembanding : Ulli AbsorAnsoriTerbanding : Kepala Desa Jatimulyo	eCourt 88/G/2021/PTUN.SMG	Lain-Lain	17 Feb. 2022	26/B/2022/PT.TUN.SBY	40 hari	Minutasi Tgl. : 29 Mar. 2022
42	TUN SEMARANG	Pembanding : AHMAD WAHIBTerbanding : BUPATI KABUPATEN PATIZAENAL ARIFIN	eCourt 86/G/2021/PTUN.SMG	Lain-Lain	18 Feb. 2022	27/B/2022/PT.TUN.SBY	40 hari	Minutasi Tgl. : 30 Mar. 2022

43	TUN KUPANG	Pembanding : Soleman AmnahTerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KupangMARKUS TUNBONAT	eCourt 19/G/2021/PTUN.KPG	Pertanahan	18 Feb. 2022	28/B/2022/PT.TUN.SBY	81 hari	Minutasi Tgl. : 10 Mei. 2022
44	TUN SURABAYA	Pembanding/Terbanding : Bupati BangkalanTerbanding : SyamsuriSaifuddin	eCourt 124/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	01 Mar. 2022	29/B/2022/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasi Tgl. : 29 Mar. 2022
45	TUN KUPANG	Pembanding : BUPATI BELUTerbanding : Drs. Marsel Mau MetaDrs. Anton SuroRumaldus TH. J. Manek, S. P.Drs. Alfredo Pires Amaral, M.MMarius Fortunatus Loe, S.IP	eCourt 25/G/2021/PTUN.KPG	Kepegawaian	01 Mar. 2022	30/B/2022/PT.TUN.SBY	30 hari	Minutasi Tgl. : 31 Mar. 2022
46	TUN SURABAYA	Pembanding : ALUISIUS ABDUL MUINMARIA LUCIA SETYOWATITerbanding : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA IPERMADI WAHYU DINI MARIYONO, S.HPT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya HR MuhammadPT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya	eCourt 138/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	02 Mar. 2022	31/B/2022/PT.TUN.SBY	49 hari	Minutasi Tgl. : 20 Apr. 2022
47	TUN MATARAM	Pembanding : CHAERUDDIN ACHMADTerbanding : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWAMANERLY FLODEILA	eCourt 34/G/2021/PTUN.MTR	Pertanahan	08 Mar. 2022	32/B/2022/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasi Tgl. : 13 Apr. 2022
48	TUN KUPANG	Pembanding : RUDYANTO SULIAWANTerbanding : Keuskupan DenpasarKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat	eCourt 14/G/2021/PTUN.KPG	Pertanahan	08 Mar. 2022	33/B/2022/PT.TUN.SBY	31 hari	Minutasi Tgl. : 08 Apr. 2022
49	TUN SURABAYA	Pembanding/Terbanding : KEPALA DESA MLILIRTerbanding : MOCH. ANDRY NAHARIGUNCORO	eCourt 140/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	16 Mar. 2022	34/B/2022/PT.TUN.SBY	34 hari	Minutasi Tgl. : 19 Apr. 2022
50	TUN MATARAM	Pembanding : GUBERNUR NTBTerbanding : FATHURRIJAL	eCourt 35/G/2021/PTUN.MTR	Lain-Lain	16 Mar. 2022	35/B/2022/PT.TUN.SBY	40 hari	Minutasi Tgl. : 25 Apr. 2022
51	TUN SURABAYA	Pembanding : LILIK SUJATIVITA LUKITAWATIVIVIEN NOVIANDIRIDEDY PRASETJO APRILIAWANVAN NUGROHO PERMONODWI NOER HIDAYATITRI WAHYUNITerbanding : BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA IISUHARTIK, DRH.EKO SRI HARYANIAGUS SUSANTO, S.H.SRI NINUK WIDAYATI, IRAGUT WITONO	eCourt 105/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	16 Mar. 2022	36/B/2022/PT.TUN.SBY	55 hari	Minutasi Tgl. : 10 Mei. 2022

52	TUN SURABAYA	Pembanding : SanemanTerbanding : KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATIADIBUPATI PROBOLINGGO	eCourt 153/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	16 Mar. 2022	37/B/2022/PT.TUN.SBY	68 hari	Minutasi Tgl. : 23 Mei. 2022
53	TUN SURABAYA	Pembanding : Edy SuprayitnoTerbanding : Kepala Desa Gedang Kulut	eCourt 161/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	28 Mar. 2022	38/B/2022/PT.TUN.SBY	44 hari	Minutasi Tgl. : 11 Mei. 2022
54	TUN SURABAYA	Pembanding/Terbanding : LUTFITerbanding : ABD MANANBUPATI BANGKALAN	eCourt 155/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	28 Mar. 2022	39/B/2022/PT.TUN.SBY	16 hari	Minutasi Tgl. : 13 Apr. 2022
55	TUN MATARAM	Pembanding : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAHTerbanding : Lalu najwaBaik mulyawatiHj. NUR'AINI, SE.	eCourt 38/G/2021/PTUN.MTR	Pertanahan	28 Mar. 2022	40/B/2022/PT.TUN.SBY	51 hari	Minutasi Tgl. : 18 Mei. 2022
56	TUN MATARAM	Pembanding/Terbanding : ROHANIZOHRAWATISENIMAHSUKRON MHFADLISAMSUL HADISITI KHAIRI UMATINALPI SAHRINFIRDAUS NUZULATerbanding : SAHIR alias H. SYAHARUDINKantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat	eCourt 32/G/2021/PTUN.MTR	Pertanahan	28 Mar. 2022	41/B/2022/PT.TUN.SBY	51 hari	Minutasi Tgl. : 18 Mei. 2022
57	TUN KUPANG	Pembanding : PT. Naviri Multi KonstruksiTerbanding : KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)	eCourt 22/G/2021/PTUN.KPG	Tender	30 Mar. 2022	42/B/2022/PT.TUN.SBY	54 hari	Minutasi Tgl. : 23 Mei. 2022
58	TUN MATARAM	Pembanding : HADIJAHTerbanding : POKJA SDA 2 Tahun 2021 Kota BimaPPK REHABILITASI DAM NGERUKEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR KOTA BIMAKEPALA DINAS PUPR KOTA BIMA	eCourt 39/G/2021/PTUN.MTR	Tender	07 Apr. 2022	43/B/2022/PT.TUN.SBY	18 hari	Minutasi Tgl. : 25 Apr. 2022
59	TUN MATARAM	Pembanding : KEPALA DESA BAREJULAT KABUPATEN LOMBOK TENGAHTerbanding : Haji TahriMarimLalu Adi KusumajayahH. Mahsun NardiHaji Irfham	eCourt 37/G/2021/PTUN.MTR	Lain-Lain	07 Apr. 2022	44/B/2022/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasi Tgl. : 18 Mei. 2022
60	TUN SURABAYA	Pembanding : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIKTerbanding : Hj. NUR HASANAH	eCourt 171/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	12 Apr. 2022	45/B/2022/PT.TUN.SBY	57 hari	Minutasi Tgl. : 08 Jun. 2022

61	TUN MATARAM	Pembanding : SyamsuddinTerbanding : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten SumbawaNOVI MUFIDAH SURYANI	eCourt 44/G/2021/PTUN. MTR	Pertanahan	12 Apr. 2022	46/B/2022/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasi Tgl. : 23 Mei. 2022
62	TUN SURABAYA	Pembanding : KARIYONOSENIHAMMUSLIKBUYUSWAHYU PURWONOPRIYOTerbanding : KEMENTERIAN ATR BPN Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA IFERRY SYAIFULLAH ARIFINMOCHAMAD FARID NURACHMANNOVANDA TRI SETYO BUDI ARIFIN	eCourt 172/G/2021/PTUN. .SBY	Pertanahan	14 Apr. 2022	47/B/2022/PT.TUN.SBY	49 hari	Minutasi Tgl. : 02 Jun. 2022
63	TUN MATARAM	Pembanding : SayeTerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok TengahPT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIAKEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NTB	eCourt 41/G/2021/PTUN. MTR	Pertanahan	22 Apr. 2022	48/B/2022/PT.TUN.SBY	31 hari	Minutasi Tgl. : 23 Mei. 2022
64	TUN SEMARANG	Pembanding : GidahSuratiTerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten WonosobobAMBANG RIYANTO	eCourt 97/G/TF/2021/PT UN.SMG	Lain-Lain	22 Apr. 2022	49/B/2022/PT.TUN.SBY	46 hari	Minutasi Tgl. : 07 Jun. 2022
65	TUN SEMARANG	Pembanding : PT. Unggul Perdana Mulya (Diwakili oleh Djoko Triwarno, S.T.)Terbanding : Pejabat Pembuat Komitmen Selaku Pengguna Jasa pada Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Temperak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang TA 2021	eCourt 95/G/2021/PTUN. SMG	Lelang	22 Apr. 2022	50/B/2022/PT.TUN.SBY	31 hari	Minutasi Tgl. : 23 Mei. 2022
66	TUN SURABAYA	Pembanding : Bupati ProbolinggoTerbanding : sawar	eCourt 150/G/2021/PTUN. .SBY	Lain-Lain	22 Apr. 2022	51/B/2022/PT.TUN.SBY	48 hari	Minutasi Tgl. : 09 Jun. 2022
67	TUN SEMARANG	Pembanding : Budi PrasetyoYuliana PrasetyoTerbanding : Pemerintah Kota Salatiga	eCourt 104/G/TF/2021/PT UN.SMG	Lain-Lain	09 Mei. 2022	52/B/2022/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasi Tgl. : 06 Jun. 2022
68	TUN SEMARANG	Pembanding/Terbanding : Kepala Kantor Pertanahan/ BPN Kabupaten PatiTerbanding : Endah Nur OomariDiah WulansariPemerintahan Desa Gunungwungkal	eCourt 98/G/2021/PTUN. SMG	Pertanahan	09 Mei. 2022	53/B/2022/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasi Tgl. : 07 Jun. 2022
69	TUN SURABAYA	Pembanding/Terbanding : M. Aly AmrinTerbanding : ABDULLOH TAMAMYBUPATI BANGKALAN	eCourt 162/G/2021/PTUN. .SBY	Lain-Lain	09 Mei. 2022	54/B/2022/PT.TUN.SBY	31 hari	Minutasi Tgl. : 09 Jun. 2022

70	TUN SURABAYA	Pembanding : YASJUDANTerbanding : KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANGHJ. LIK ANAHYENI DWI RACHMAWATIBAGUS CAHYONO DYAN SAPUTROPT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANGSRI MAWARNI	eCourt 163/G/2021/PTUN. .SBY	Pertanahan	09 Mei. 2022	55/B/2022/PT.TUN.SBY	30 hari	Minutasi Tgl. : 08 Jun. 2022
71	TUN DENPASAR	Pembanding : DR. YUDHI SETIAWAN, Drs., SH., M. SiTerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar	eCourt 17/G/2021/PTUN. DPS	Pertanahan	09 Mei. 2022	56/B/2022/PT.TUN.SBY	44 hari	Minutasi Tgl. : 22 Jun. 2022
72	TUN MATARAM	Pembanding : Dedi Ismayadi (Kepala Desa Wajageseng)Terbanding : MUHADI	eCourt 46/G/2021/PTUN. MTR	Lain-Lain	12 Mei. 2022	57/B/2022/PT.TUN.SBY	34 hari	Minutasi Tgl. : 15 Jun. 2022
73	TUN DENPASAR	Pembanding/Terbanding : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi BaliDirektur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE)Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RITerbanding/Pembanding : PT Playu Samudra Bali	eCourt 15/G/TF/2021/PT UN.DPS	Lain-Lain	12 Mei. 2022	58/B/TF/2022/PT.TUN. SBY	57 hari	Minutasi Tgl. : 08 Jul. 2022
74	TUN KUPANG	Pembanding : EDOARDO BUDIMAN NUBATONISTerbanding : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR	eCourt 34/G/2021/PTUN. KPG	Kepegawaian	20 Mei. 2022	59/B/2022/PT.TUN.SBY	40 hari	Minutasi Tgl. : 29 Jun. 2022
75	TUN SURABAYA	Pembanding : HARLINTerbanding : KEPALA DESA SEKARANM. QORI SUBARA	eCourt 181/G/2021/PTUN. .SBY	Lain-Lain	27 Mei. 2022	60/B/2022/PT.TUN.SBY	21 hari	Minutasi Tgl. : 17 Jun. 2022
76	TUN SEMARANG	Pembanding : SumberTerbanding : Muh ZaenudinKepala Desa Kedondong	eCourt 101/G/2021/PTUN. SMG	Lain-Lain	02 Jun. 2022	61/B/2022/PT.TUN.SBY	55 hari	Minutasi Tgl. : 27 Jul. 2022
77	TUN SEMARANG	Pembanding : TANTIK WILAYATERbanding : Kantor Pertanahan Kabupaten KaranganyarPT. Bank Mega TBKStephanie HartonoLydia Hartono	eCourt 105/G/2021/PTUN. SMG	Pertanahan	06 Jun. 2022	62/B/2022/PT.TUN.SBY	37 hari	Minutasi Tgl. : 13 Jul. 2022
78	TUN SURABAYA	Pembanding : ashari bin h. junaidi alias asyari zunaidi/IsayahTerbanding : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa TimurSUWORSUBIYANTOAMBAR SARI SOYAYULYANARUDY SUSANTOSUHARTONO	eCourt 169/G/2021/PTUN. .SBY	Pertanahan	06 Jun. 2022	63/B/2022/PT.TUN.SBY	31 hari	Minutasi Tgl. : 07 Jul. 2022

79	TUN MATARAM	Pembanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok TimurTerbanding : Muhammad Safrudin	eCourt 51/G/2021/PTUN. MTR	Pertanahan	07 Jun. 2022	64/B/2022/PT.TUN.SBY	50 hari	Minutasi Tgl. : 27 Jul. 2022
80	TUN SURABAYA	Pembanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten MalangTerbanding : GOENARSO KARTAWIDJAJA	eCourt 196/G/2021/PTUN. .SBY	Lain-Lain	07 Jun. 2022	65/B/2022/PT.TUN.SBY	21 hari	Minutasi Tgl. : 28 Jun. 2022
81	TUN SEMARANG	Pembanding : Kepala kantor pertanahan kabupaten PatiTerbanding : JamirahHARTOYOLINA MURWATI	eCourt 106/G/2021/PTUN. SMG	Pertanahan	13 Jun. 2022	66/B/2022/PT.TUN.SBY	32 hari	Minutasi Tgl. : 15 Jul. 2022
82	TUN SURABAYA	Pembanding : MunayahREHATITerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BanyuwangUUSMAN	eCourt 174/G/2021/PTUN. .SBY	Pertanahan	13 Jun. 2022	67/B/2022/PT.TUN.SBY	37 hari	Minutasi Tgl. : 20 Jul. 2022
83	TUN SURABAYA	Pembanding : PT. MULTI KARYA PRATAMATERbanding : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XI PROVINSI JAWA TIMUR	eCourt 195/G/2021/PTUN. .SBY	Lain-Lain	13 Jun. 2022	68/B/2022/PT.TUN.SBY	32 hari	Minutasi Tgl. : 15 Jul. 2022
84	TUN SEMARANG	Pembanding : JIM HERMANSIANY PUDJIASTUTITerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten SemarangMuhammad Dirgantara Indonesia, S.H. selaku Kurator CV. INTI KHARISMA FURNITURE	eCourt 103/G/2021/PTUN. SMG	Pertanahan	20 Jun. 2022	69/B/2022/PT.TUN.SBY	32 hari	Minutasi Tgl. : 22 Jul. 2022
85	TUN SURABAYA	Pembanding : MUSNING.Terbanding : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN. MIYATUN	eCourt 194/G/2021/PTUN. .SBY	Pertanahan	20 Jun. 2022	70/B/2022/PT.TUN.SBY	23 hari	Minutasi Tgl. : 13 Jul. 2022
86	TUN SURABAYA	Pembanding : H. ABDUL KARIMTerbanding : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANGKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	eCourt 167/G/2021/PTUN. .SBY	Pertanahan	20 Jun. 2022	71/B/2022/PT.TUN.SBY	32 hari	Minutasi Tgl. : 22 Jul. 2022
87	TUN SURABAYA	Pembanding : EDI PRAWONO,dkk (18 Orang) Terbanding : PT. DHL SUPPLY CHAIN INDONESIAKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR	eCourt 180/G/2021/PTUN. .SBY	Lain-Lain	20 Jun. 2022	72/B/2022/PT.TUN.SBY	37 hari	Minutasi Tgl. : 27 Jul. 2022
88	TUN SURABAYA	Pembanding : IDA NURAINITerbanding : Dr. SOEPRIYO IMAN, Sp. OGKEPALA KANTOR URUSAN AGAMA PUNGGING	eCourt 202/G/2021/PTUN. .SBY	Lain-Lain	20 Jun. 2022	73/B/2022/PT.TUN.SBY	44 hari	Minutasi Tgl. : 03 Agu. 2022
89	TUN KUPANG	Pembanding : KANISIUS YOSEPHTerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KupangBERTHA AM LOAKJACOBA LOAK	eCourt 27/G/2021/PTUN. KPG	Pertanahan	20 Jun. 2022	74/B/2022/PT.TUN.SBY	35 hari	Minutasi Tgl. : 25 Jul. 2022

90	TUN KUPANG	Pembanding : Johanes Imanuel Nenoso Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	eCourt 33/G/2021/PTUN.KPG	Kepegawaian	20 Jun. 2022	75/B/2022/PT.TUN.SBY	35 hari	Minutasi Tgl. : 25 Jul. 2022
91	TUN KUPANG	Pembanding : SEPRI YUFENTI SIKI Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	eCourt 36/G/2021/PTUN.KPG	Kepegawaian	20 Jun. 2022	76/B/2022/PT.TUN.SBY	35 hari	Minutasi Tgl. : 25 Jul. 2022
92	TUN KUPANG	Pembanding : KEPALA DESA TEBOLE Mesri Jefferson Sanuayanor Sanurandi Kadek Joniazar Ndun	eCourt 37/G/2021/PTUN.KPG	Lain-Lain	20 Jun. 2022	77/B/2022/PT.TUN.SBY	15 hari	Minutasi Tgl. : 05 Jul. 2022
93	TUN KUPANG	Pembanding : KEPALA DESA NGGELODAE Olis Paulus Koanakatri Afliana Lutuhal Alexander Malelakida Royani Jesuafenci Sinlaealexander Sinlaegodlif Tanu	eCourt 29/G/2021/PTUN.KPG	Lain-Lain	22 Jun. 2022	78/B/2022/PT.TUN.SBY	43 hari	Minutasi Tgl. : 04 Agu. 2022
94	TUN SEMARANG	Pembanding : Bupati Kudus (Dr. HM. Hartopo, S.T., M. M., M.H.) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Pemerintahan Desa Hadipolo	eCourt 107/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	22 Jun. 2022	79/B/2022/PT.TUN.SBY	43 hari	Minutasi Tgl. : 04 Agu. 2022
95	TUN SEMARANG	Pembanding/Terbanding : Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang Farid Ma'ruf, S.H. Abdul Khamid, S.H. Umroh Agus Gunawan Oesman Sayang Maesroth Miftakul Jannah KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT BAHTERAPT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG PEMALANG	eCourt 100/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	23 Jun. 2022	80/B/2022/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasi Tgl. : 29 Jul. 2022
96	TUN SURABAYA	Pembanding : ARFA Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Hadiya	eCourt 183/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	04 Jul. 2022	81/B/2022/PT.TUN.SBY	37 hari	Minutasi Tgl. : 10 Agu. 2022
97	TUN SURABAYA	Pembanding : ARFA Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Samsuri	eCourt 185/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	04 Jul. 2022	82/B/2022/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasi Tgl. : 15 Agu. 2022
98	TUN SURABAYA	Pembanding : ARFA Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Parifaniyah	eCourt 184/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	04 Jul. 2022	83/B/2022/PT.TUN.SBY	32 hari	Minutasi Tgl. : 05 Agu. 2022
99	TUN SURABAYA	Pembanding : ARFA Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Pimam Sudiannya	eCourt 182/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	04 Jul. 2022	84/B/2022/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasi Tgl. : 09 Agu. 2022
100	TUN SEMARANG	Pembanding : PT. Amir Hajar Kili (AHK) Bupati Rembang	eCourt 1/G/TF/2022/PTU.N.SMG	Lain-Lain	04 Jul. 2022	85/B/TF/2022/PT.TUN.SBY	32 hari	Minutasi Tgl. : 05 Agu. 2022
101	TUN SURABAYA	Pembanding : ARFA Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Wati	eCourt 186/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	04 Jul. 2022	86/B/2022/PT.TUN.SBY	31 hari	Minutasi Tgl. : 04 Agu. 2022
102	TUN SEMARANG	Pembanding/Terbanding : A. Sri Rejeki Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Subarinah Daryani R. Daryanto	eCourt 4/G/2022/PTUN.SMG	Pertanahan	05 Jul. 2022	87/B/2022/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasi Tgl. : 03 Agu. 2022
103	TUN SURABAYA	Pembanding : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya PT. Artorius Telemetri Sentosa	eCourt 193/G/2021/PTUN.SBY	Perijinan	05 Jul. 2022	88/B/2022/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasi Tgl. : 03 Agu. 2022
104	TUN SURABAYA	Pembanding : LUOMAN ALWI Rektor Universitas Airlangga	eCourt 190/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	07 Jul. 2022	89/B/2022/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasi Tgl. : 18 Agu. 2022
105	TUN SEMARANG	Pembanding : Bambang Daryono Bupati Wonogiri	eCourt 3/G/2022/PTUN.SMG	Lain-Lain	07 Jul. 2022	90/B/2022/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasi Tgl. : 04 Agu. 2022
106	TUN KUPANG	Pembanding : PETRUS KOPONG EBAN Atakelan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	eCourt 30/G/2021/PTUN.KPG	Kepegawaian	11 Jul. 2022	91/B/2022/PT.TUN.SBY	30 hari	Minutasi Tgl. : 10 Agu. 2022
107	TUN SURABAYA	Pembanding : HARI BOEDI HARTONOEDDY SUSANTO Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya Kepala Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya PT SHELL INDONESIA	eCourt 166/G/LH/2021/PTUN.SBY	Pencemaran Udara dan Gangguan (Kebisingan, Getaran dan Kebauhan)	11 Jul. 2022	92/B/LH/2022/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasi Tgl. : 22 Agu. 2022
108	TUN DENPASAR	Pembanding : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI Ketut Darmal Putu Suidiana Ketut Ginastra	eCourt 2/G/2022/PTUN.DPS	Pertanahan	18 Jul. 2022	93/B/2022/PT.TUN.SBY	32 hari	Minutasi Tgl. : 19 Agu. 2022
109	TUN MATARAM	Pembanding : Hj. BAIQ INDIRI Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara	eCourt 56/G/2021/PTUN.MTR	Pertanahan	21 Jul. 2022	94/B/2022/PT.TUN.SBY	32 hari	Minutasi Tgl. : 22 Agu. 2022
110	TUN SEMARANG	Pembanding : Soejati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang	eCourt 6/G/2022/PTUN.SMG	Pertanahan	25 Jul. 2022	95/B/2022/PT.TUN.SBY	57 hari	Minutasi Tgl. : 20 Sep. 2022
111	TUN KUPANG	Pembanding : RINTO MARTHINUS MANOEELISABET FANGGI Kepala Desa Batutua	eCourt 1/G/2022/PTUN.KPG	Lain-Lain	25 Jul. 2022	96/B/2022/PT.TUN.SBY	25 hari	Minutasi Tgl. : 19 Agu. 2022
112	TUN YOGYAKARTA	Pembanding : SUHARTISUTINAH MANTO HARJONO Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Yudi Susanto, SE	eCourt 2/G/2022/PTUN.YK	Pertanahan	25 Jul. 2022	97/B/2022/PT.TUN.SBY	24 hari	Minutasi Tgl. : 18 Agu. 2022
113	TUN SURABAYA	Pembanding : Ahmad Juhairi Bupati Sumenep Darussalam	eCourt 2/G/2022/PTUN.SBY	Lain-Lain	28 Jul. 2022	98/B/2022/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasi Tgl. : 08 Sep. 2022
114	TUN SURABAYA	Pembanding : Moh. Munandar Bupati Sumenep	eCourt 3/G/2022/PTUN.SBY	Lain-Lain	28 Jul. 2022	99/B/2022/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasi Tgl. : 07 Sep. 2022
115	TUN MATARAM	Pembanding : GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT Budi Satriawan, A. MG	eCourt 6/G/2022/PTUN.MTR	Lain-Lain	08 Agu. 2022	100/B/2022/PT.TUN.SBY	25 hari	Minutasi Tgl. : 02 Sep. 2022
116	TUN SURABAYA	Pembanding : YAYASAN PEMBANGUNAN DAN SOSIAL DJAWA TIMUR Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Jenny Ruslim	eCourt 191/G/2021/PTUN.SBY	Perijinan	08 Agu. 2022	101/B/2022/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasi Tgl. : 13 Sep. 2022
117	TUN SURABAYA	Pembanding : AHMAD THALIB BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Moch. Thal At Fahim Muhammad Akram Aziz	eCourt 13/G/2022/PTUN.SBY	Pertanahan	10 Agu. 2022	102/B/2022/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasi Tgl. : 20 Sep. 2022

118	TUN KUPANG	Pembanding : Lurah BelloTerbanding : JULIUS PATOLA, S.Pd	eCourt 41/G/2021/PTUN. KPG	Lain-Lain	10 Agu. 2022	103/B/2022/PT.TUN.SBY	23 hari	Minutasi Tgl. : 02 Sep. 2022
119	TUN SURABAYA	Pembanding : Panitia Pemilihan Kepala Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten PamekasanTerbanding : ERFANDIDAHRIYAHMULYADI	eCourt 37/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	15 Agu. 2022	104/B/2022/PT.TUN.SBY	16 hari	Minutasi Tgl. : 31 Agu. 2022
120	TUN SEMARANG	Pembanding : Mulyadi bin KamsriTerbanding : Kepala Desa Gribig Kecamatan Gabog Kabupaten Kudus Jawa TengahCamat Gebog Kabupaten Kudus Jawa TengahKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	eCourt 9/G/2022/PTUN. SMG	Pertanahan	15 Agu. 2022	105/B/2022/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasi Tgl. : 13 Sep. 2022
121	TUN SURABAYA	Pembanding : DARSONO Bin TARLINTerbanding : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGANLIPAH	eCourt 27/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	18 Agu. 2022	106/B/2022/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasi Tgl. : 15 Sep. 2022
122	TUN DENPASAR	Pembanding : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi BaliKepala Kantor Pertanahan Kota DenpasarTerbanding : Ir. Hidayat Leksonowidodo	eCourt 3/G/2022/PTUN. DPS	Pertanahan	22 Agu. 2022	107/B/2022/PT.TUN.SBY	52 hari	Minutasi Tgl. : 13 Okt. 2022
123	TUN SEMARANG	Pembanding : Federasi Serikat Pekerja Metal IndonesiaTerbanding : Gubernur Jawa Tengah	eCourt 11/G/2022/PTUN. SMG	Lain-Lain	22 Agu. 2022	108/B/2022/PT.TUN.SBY	23 hari	Minutasi Tgl. : 14 Sep. 2022
124	TUN SEMARANG	Pembanding : Satya AgustianTerbanding : Kepala Desa Kedunglegok	eCourt 12/G/2022/PTUN. SMG	Lain-Lain	22 Agu. 2022	109/B/2022/PT.TUN.SBY	31 hari	Minutasi Tgl. : 22 Sep. 2022
125	TUN SURABAYA	Pembanding : SUHRIYASURAKNASAHAMOH. SALIMMUSAPPAKTerbanding : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEPNISAB	eCourt 14/G/2022/PTUN. SBY	Pertanahan	23 Agu. 2022	110/B/2022/PT.TUN.SBY	52 hari	Minutasi Tgl. : 14 Okt. 2022
126	TUN SURABAYA	Pembanding : MARHAMAH B. MARTALIASOON BUDIMANMOH. RASIDIHJ. SITI MAISAROTerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BangkalanWEFI	eCourt 12/G/2022/PTUN. SBY	Pertanahan	23 Agu. 2022	111/B/2022/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasi Tgl. : 21 Sep. 2022
127	TUN MATARAM	Pembanding : IRMA ZAIMATUDDUNIATerbanding : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat	eCourt 13/G/2022/PTUN. MTR	Pertanahan	23 Agu. 2022	112/B/2022/PT.TUN.SBY	34 hari	Minutasi Tgl. : 26 Sep. 2022
128	TUN YOGYAKARTA	Pembanding : JAKA DWI SUYATINTerbanding : LURAH SIDOREJO	eCourt 3/G/2022/PTUN. YK	Lain-Lain	23 Agu. 2022	113/B/2022/PT.TUN.SBY	34 hari	Minutasi Tgl. : 26 Sep. 2022
129	TUN SURABAYA	Pembanding : AGUS ISWANDITerbanding : KANTOR BUPATI SIDOARJOMULYANTO, SH	eCourt 9/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	23 Agu. 2022	114/B/2022/PT.TUN.SBY	35 hari	Minutasi Tgl. : 27 Sep. 2022
130	TUN KUPANG	Pembanding : Syarif Pati PilohiTerbanding : Panitia Pemilihan Kepala Desa Balauring	eCourt 31/G/2021/PTUN. KPG	Lain-Lain	25 Agu. 2022	115/B/2022/PT.TUN.SBY	26 hari	Minutasi Tgl. : 20 Sep. 2022
131	TUN KUPANG	Pembanding/Terbanding : KATHARINA SANIAMTerbanding/Pembanding : FINSENSIUS BAITANUK/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANGYOSEF SANAM, SH	eCourt 32/G/2021/PTUN. KPG	Pertanahan	29 Agu. 2022	116/B/2022/PT.TUN.SBY	51 hari	Minutasi Tgl. : 19 Okt. 2022
132	TUN MATARAM	Pembanding : ASHARUDDIN MUCHTARTerbanding : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sumabawa BaratIr. H. JHONI HARTONO, S. M.Sc.	eCourt 4/G/2022/PTUN. MTR	Pertanahan	29 Agu. 2022	117/B/2022/PT.TUN.SBY	22 hari	Minutasi Tgl. : 20 Sep. 2022
133	TUN SEMARANG	Pembanding : PT. Pudan KreasiTerbanding : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Area IPT. Indria Putra Persada	eCourt 16/G/2022/PTUN. SMG	Lelang	29 Agu. 2022	118/B/2022/PT.TUN.SBY	32 hari	Minutasi Tgl. : 30 Sep. 2022
134	TUN SURABAYA	Pembanding : Bupati BondowosoTerbanding : Angwar	eCourt 31/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	29 Agu. 2022	119/B/2022/PT.TUN.SBY	24 hari	Minutasi Tgl. : 22 Sep. 2022
135	TUN SURABAYA	Pembanding : Bupati MadiunTerbanding : Bambang Hariyanto	eCourt 25/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	29 Agu. 2022	120/B/2022/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasi Tgl. : 27 Sep. 2022
136	TUN SURABAYA	Pembanding : DEBBY LIANASARISURYADHAMMA SUTANTO alias TAN TJIAUW KWANGMARISA MILLICENT SUTANTOTerbanding : WALIKOTA SURABAYAPT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG SURABAYA KAPAS KRAMPUNG MERRY HADI WINATAANGGELINA CHINDRAYANTILINDA SISILIA CHANDRATAN JEMMY TANKILISANG	eCourt 6/G/2022/PTUN. SBY	Perijinan	29 Agu. 2022	121/B/2022/PT.TUN.SBY	63 hari	Minutasi Tgl. : 31 Okt. 2022
137	TUN SEMARANG	Pembanding : Kepala Kantor Pertanahan Kota SurakartaTerbanding : Wiroadono/Tugimin	eCourt 31/G/2022/PTUN. SMG	Pertanahan	30 Agu. 2022	122/B/2022/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasi Tgl. : 28 Sep. 2022
138	TUN SEMARANG	Pembanding : PT. Pudan KreasiTerbanding : Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIYPT. INDIRIA PUTRA PERSADA	eCourt 14/G/2022/PTUN. SMG	Lelang	02 Sep. 2022	123/B/2022/PT.TUN.SBY	20 hari	Minutasi Tgl. : 22 Sep. 2022
139	TUN SURABAYA	Pembanding : KUSBANDITerbanding : BUPATI LAMONGAN	eCourt 24/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	02 Sep. 2022	124/B/2022/PT.TUN.SBY	52 hari	Minutasi Tgl. : 24 Okt. 2022
140	TUN MATARAM	Pembanding : Kepala Desa LawinTerbanding : SYABRAM	eCourt 3/G/2022/PTUN. MTR	Lain-Lain	02 Sep. 2022	125/B/2022/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasi Tgl. : 13 Okt. 2022
141	TUN SEMARANG	Pembanding : PT. Putri Mahakam LestariTerbanding : Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan DIYPT. MITRA PEMBANGUNAN KALBAR	eCourt 15/G/2022/PTUN. SMG	Lelang	02 Sep. 2022	126/B/2022/PT.TUN.SBY	24 hari	Minutasi Tgl. : 26 Sep. 2022
142	TUN SURABAYA	Pembanding : DEWI CAMELATerbanding : KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DRINGU KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGOBUKHARI,	eCourt 34/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	02 Sep. 2022	127/B/2022/PT.TUN.SBY	39 hari	Minutasi Tgl. : 11 Okt. 2022
143	TUN KUPANG	Pembanding : MESCHERD PELLO, S.IpTerbanding : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG	eCourt 4/G/TF/2022/PTU N.KPG	Pertanahan	02 Sep. 2022	128/B/TF/2022/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasi Tgl. : 13 Okt. 2022
144	TUN KUPANG	Pembanding : Sardjono SaniTerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai BaratPAUL SUMITO	eCourt 38/G/2021/PTUN. KPG	Pertanahan	06 Sep. 2022	129/B/2022/PT.TUN.SBY	86 hari	Minutasi Tgl. : 01 Des. 2022
145	TUN SURABAYA	Pembanding : ACH SUHAIRITerbanding : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TRASAK	eCourt 55/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	09 Sep. 2022	130/B/2022/PT.TUN.SBY	32 hari	Minutasi Tgl. : 11 Okt. 2022
146	TUN SURABAYA	Pembanding : MOCH HASANTerbanding : Kepala Desa Pakuwesi	eCourt 47/G/2022/PTUN. SBY	Pertanahan	09 Sep. 2022	131/B/2022/PT.TUN.SBY	33 hari	Minutasi Tgl. : 12 Okt. 2022
147	TUN DENPASAR	Pembanding/Terbanding : Yayasan Pengayom Umat Hindu (YPUH)Terbanding/Pembanding : Bupati buleleng	eCourt 7/G/2022/PTUN. DPS	Lain-Lain	09 Sep. 2022	132/B/2022/PT.TUN.SBY	39 hari	Minutasi Tgl. : 18 Okt. 2022



148	TUN MATARAM	Pembanding : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMURTerbanding : LALU SRIBAWALALU RUMAWIYAM	eCourt 8/G/2022/PTUN. MTR	Lain-Lain	13 Sep. 2022	133/B/2022/PT.TUN.SBY	30 hari	Minutasi Tgl. : 13 Okt. 2022
149	TUN SURABAYA	Pembanding : DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (DPW FSPMI) JAWA TIMURTerbanding : GUBERNUR JAWA TIMUR	eCourt 20/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	13 Sep. 2022	134/B/2022/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasi Tgl. : 12 Okt. 2022
150	TUN SURABAYA	Pembanding : CUPLIKSRI RUKHATINTerbanding : KEPALA KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PROBOLINGGO	eCourt 30/G/2022/PTUN. SBY	Pertanahan	13 Sep. 2022	135/B/2022/PT.TUN.SBY	44 hari	Minutasi Tgl. : 27 Okt. 2022
151	TUN SURABAYA	Pembanding : KEPALA DESA SUMBER KEMUNING, KECAMATAN TAMANAN, KABUPATEN BONDOWOSOTerbanding : M. FAUZICAMAT TAMANAN, KABUPATEN BONDOWOSO	eCourt 41/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	13 Sep. 2022	136/B/2022/PT.TUN.SBY	38 hari	Minutasi Tgl. : 21 Okt. 2022
152	TUN SURABAYA	Pembanding : KEPALA DESA SUMBER KEMUNING, KECAMATAN TAMANAN, KABUPATEN BONDOWOSOTerbanding : ABDUL GAFUR	eCourt 42/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	13 Sep. 2022	137/B/2022/PT.TUN.SBY	37 hari	Minutasi Tgl. : 20 Okt. 2022
153	TUN SURABAYA	Pembanding : KEPALA DESA SUMBER KEMUNING, KECAMATAN TAMANAN, KABUPATEN BONDOWOSO Terbanding : SUPRI RISMANO CAMAT TAMANAN, KABUPATEN BONDOWOSO	eCourt 43/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	13 Sep. 2022	138/B/2022/PT.TUN.SBY	31 hari	Minutasi Tgl. : 14 Okt. 2022
154	TUN SURABAYA	Pembanding : KEPALA DESA SUMBER KEMUNING, KECAMATAN TAMANAN, KABUPATEN BONDOWOSOTerbanding : IRMA NUR SOFIAH	eCourt 45/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	13 Sep. 2022	139/B/2022/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasi Tgl. : 12 Okt. 2022
155	TUN DENPASAR	Pembanding : KwinartiTerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulelengl Wayan Madral Wayan Edi Parsa	eCourt 10/G/2022/PTUN. DPS	Pertanahan	15 Sep. 2022	140/B/2022/PT.TUN.SBY	53 hari	Minutasi Tgl. : 07 Nov. 2022
156	TUN KUPANG	Pembanding : BUPATI TIMOR TENGAH SELATANTerbanding : AWALUDIN ISU	eCourt 8/G/2022/PTUN. KPG	Lain-Lain	15 Sep. 2022	141/B/2022/PT.TUN.SBY	34 hari	Minutasi Tgl. : 19 Okt. 2022
157	TUN SURABAYA	Pembanding : WALIKOTA PROBOLINGGOKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGOTerbanding : CV. GRAHA PAPAN LESTARI	eCourt 58/G/2022/PTUN. SBY	Perjinan	15 Sep. 2022	142/B/2022/PT.TUN.SBY	35 hari	Minutasi Tgl. : 20 Okt. 2022

158	TUN SURABAYA	Pembanding : KEPALA DESA SUMBER KEMUNING, KECAMATAN TAMANAN, KABUPATEN BONDOWOSOTerbanding : DIDIK SUSILO WANTORO	eCourt 44/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	15 Sep. 2022	143/B/2022/PT.TUN.SBY	56 hari	Minutasi Tgl. : 10 Nov. 2022
159	TUN SEMARANG	Pembanding : Muhamad Taufik AminudinTerbanding : Kepala Desa BumiharjoCHARISUN	eCourt 13/G/2022/PTUN. SMG	Lain-Lain	15 Sep. 2022	144/B/2022/PT.TUN.SBY	35 hari	Minutasi Tgl. : 20 Okt. 2022
160	TUN SURABAYA	Pembanding : R. SOEHARTONOTerbanding : RB. MUHAMMADMuhammad ZisBPN KAB. SUMENEP	eCourt 40/G/2022/PTUN. SBY	Pertanahan	20 Sep. 2022	145/B/2022/PT.TUN.SBY	56 hari	Minutasi Tgl. : 15 Nov. 2022
161	TUN DENPASAR	Pembanding : I KETUT YASATERbanding : GUBERNUR BALIBupati Jembrana	eCourt 6/G/TF/2022/PTU N.DPS	Lain-Lain	22 Sep. 2022	146/B/TF/2022/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasi Tgl. : 20 Okt. 2022
162	TUN SURABAYA	Pembanding : IWAN RATMONOTerbanding : BAMBANG SETIA BUDI	eCourt 53/G/2022/PTUN. SBY	Pertanahan	22 Sep. 2022	147/B/2022/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasi Tgl. : 20 Okt. 2022
163	TUN KUPANG	Pembanding : Abdullah IbrahimTerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat	eCourt 2/G/TF/2022/PTU N.KPG	Lain-Lain	23 Sep. 2022	148/B/TF/2022/PT.TUN.SBY	52 hari	Minutasi Tgl. : 14 Nov. 2022
164	TUN SEMARANG	Pembanding : Kepala Desa JatimulyoTerbanding : Muhammad Syifaun Naja, S.H.	eCourt 34/G/2022/PTUN. SMG	Lain-Lain	26 Sep. 2022	149/B/2022/PT.TUN.SBY	37 hari	Minutasi Tgl. : 02 Nov. 2022
165	TUN KUPANG	Pembanding/Terbanding : Lambertus LamanAntonius AgunTerbanding : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai BaratEDUARDUS ELVIS ANGLIWARMANPANDE NYOMAN WAHYU SUTEJADEWI TRISANTI PUSPOSENDORO (I. DEWI TRISANTI)PT ANANDARA GRIYA LESTARI	eCourt 35/G/2022/PTUN. KPG	Pertanahan	03 Okt. 2022	150/B/2022/PT.TUN.SBY	67 hari	Minutasi Tgl. : 09 Des. 2022
166	TUN SURABAYA	Pembanding : Joyce Ariyani GunawanTerbanding : Bupati Sampang Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Cq. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang	eCourt 38/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	03 Okt. 2022	151/B/2022/PT.TUN.SBY	38 hari	Minutasi Tgl. : 10 Nov. 2022
167	TUN SEMARANG	Pembanding : Oni SuprionoTerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BloraSoekarji bin Kasbolah	eCourt 28/G/2022/PTUN. SMG	Pertanahan	03 Okt. 2022	152/B/2022/PT.TUN.SBY	23 hari	Minutasi Tgl. : 26 Okt. 2022

168	TUN YOGYAKARTA	Pembanding : WAHIDINTerbanding : Kepala kantor pertanahan kabupaten bantul	eCourt 6/G/2022/PTUN. YK	Pertanahan	03 Okt. 2022	153/B/2022/PT.TUN.SBY	39 hari	Minutasi Tgl. : 11 Nov. 2022
169	TUN KUPANG	Pembanding : Lambertus Lagawuyo KumanirengTerbanding : Bupati Flores Timur	eCourt 5/G/2022/PTUN. KPG	Lain-Lain	05 Okt. 2022	154/B/2022/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasi Tgl. : 02 Nov. 2022
170	TUN SURABAYA	Pembanding : DWI WIJAYATINIDRA. RETNO DWI KARTIKA LYUDI CAHYO PURNOMOAGUS PRAYITNOUSIA INDAH SUTANTISUMANTRISUGENG RYANTOH TJAHJONOSRI HENIKATIRINJOKO TRIONO SDADANG ARDIANSAH, STDRS. SUGIANTO, S.H., SUWITO, SH.,MH,TRI INDAH IDI RETNANIDAIF RAHUNA, ST.,CHAMIM AGUS ENDRO UTAMADENDRI WAHYUDIPARIJEMSUTRISNO HADI SUSANTOSRI ANDJARIITerbanding : Wali Kota Surabaya	eCourt 64/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	05 Okt. 2022	155/B/2022/PT.TUN.SBY	54 hari	Minutasi Tgl. : 28 Nov. 2022
171	TUN KUPANG	Pembanding : BUPATI SUMBA BARAT DAYATERbanding : DANIEL LENDE KALLITurut Terbanding : PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYAPANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KALINGARABPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kalingara	eCourt 7/G/2022/PTUN. KPG	Lain-Lain	06 Okt. 2022	156/B/2022/PT.TUN.SBY	53 hari	Minutasi Tgl. : 28 Nov. 2022
172	TUN SURABAYA	Pembanding : AHMAD JAELANITerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo	eCourt 49/G/2022/PTUN. SBY	Pertanahan	13 Okt. 2022	157/B/2022/PT.TUN.SBY	21 hari	Minutasi Tgl. : 03 Nov. 2022
173	TUN MATARAM	Pembanding/Terbanding : Kepala Badan Pertanahan Kota MataramTerbanding : IsmailDRS. Gulam AbbasAKHTER HUSAIN	eCourt 15/G/2022/PTUN. MTR	Pertanahan	17 Okt. 2022	158/B/2022/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasi Tgl. : 14 Nov. 2022
174	TUN SURABAYA	Pembanding : KUD Sumber RejekiTerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten MagetanNICO SWANDANUPT BANK PANIN Tbk	eCourt 57/G/2022/PTUN. SBY	Pertanahan	20 Okt. 2022	159/B/2022/PT.TUN.SBY	27 hari	Minutasi Tgl. : 16 Nov. 2022

175	TUN SURABAYA	Pembanding : HOSRIWADIARNYOYUALI HOMAIDI, S. Pd.I.MOH. RAMLIQISWATUL JANNAHTerbanding : KEPALA DESA BADUR	eCourt 63/G/2022/PTUN. SBY	Pertanahan	27 Okt. 2022	160/B/2022/PT.TUN.SBY	15 hari	Minutasi Tgl. : 11 Nov. 2022
176	TUN KUPANG	Pembanding : DR. LAZIOSI AILIEN GUNAWANTerbanding : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	eCourt 17/G/2022/PTUN. KPG	Kepegawaian	27 Okt. 2022	161/B/2022/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasi Tgl. : 08 Des. 2022
177	TUN KUPANG	Pembanding : MERYATI ASTRIANA DJAMITerbanding : KEPALA DESA TANAH MERAH	eCourt 3/G/2022/PTUN. KPG	Lain-Lain	27 Okt. 2022	162/B/2022/PT.TUN.SBY	34 hari	Minutasi Tgl. : 30 Nov. 2022
178	TUN SURABAYA	Pembanding/Terbanding : LIM MUI TIENGTerbanding : RUDI HERIYADIARIS WAHJUDI SANTOSO, S.H., M. H.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I	eCourt 54/G/2022/PTUN. SBY	Pertanahan	27 Okt. 2022	163/B/2022/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasi Tgl. : 07 Des. 2022
179	TUN MATARAM	Pembanding : WAHDIAHASMUNIMULYATUNPARHANUDINTerbanding : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARAPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA	eCourt 25/G/2022/PTUN. MTR	Pertanahan	27 Okt. 2022	164/B/2022/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasi Tgl. : 02 Des. 2022
180	TUN SEMARANG	Pembanding : MuhammedTerbanding : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pematang	eCourt 29/G/2022/PTUN. SMG	Lain-Lain	27 Okt. 2022	165/B/2022/PT.TUN.SBY	18 hari	Minutasi Tgl. : 14 Nov. 2022
181	TUN MATARAM	Pembanding : Ignatius Arif RiyantoTerbanding : Kelompok Pemilihan(POKMIL) 015-2022	eCourt 21/G/2022/PTUN. MTR	Tender	27 Okt. 2022	166/B/2022/PT.TUN.SBY	56 hari	Minutasi Tgl. : 22 Des. 2022
182	TUN DENPASAR	Pembanding : PT. CITRA PRASASTI KONSORINDOTerbanding : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar/ Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);	eCourt 16/G/2022/PTUN. DPS	Lain-Lain	27 Okt. 2022	167/B/2022/PT.TUN.SBY	34 hari	Minutasi Tgl. : 30 Nov. 2022
183	TUN SURABAYA	Pembanding : SUGIANTOTerbanding : BUPATI JEMBER	eCourt 76/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	01 Nov. 2022	168/B/2022/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasi Tgl. : 30 Nov. 2022

184	TUN SURABAYA	Pembanding : HERI HARIYANTOTerbanding : BUPATI JEMBER	eCourt 77/G/2022/PTUN. SBY	Lain-Lain	01 Nov. 2022	169/B/2022/PT.TUN.SBY	31 hari	Minutasi Tgl. : 02 Des. 2022
185	TUN KUPANG	Pembanding : YOURY YOHANIS TILHELONGTerbanding : BUPATI KUPANGYULIANUS LAITOTOPANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA OEMATNUNU TAHUN 2021	eCourt 11/G/2022/PTUN. KPG	Lain-Lain	02 Nov. 2022	170/B/2022/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasi Tgl. : 08 Des. 2022
186	TUN SURABAYA	Pembanding : Lurah Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota SurabayaTerbanding : Sulaiman Rasjid, SP.	eCourt 96/G/2022/PTUN. SBY	Pertanahan	03 Nov. 2022	171/B/2022/PT.TUN.SBY	27 hari	Minutasi Tgl. : 30 Nov. 2022
187	TUN SURABAYA	Pembanding : KEPALA KANTOR PERTANAHAN BANGKALANTerbanding : H. JUNAIDI	eCourt 80/G/2022/PTUN. SBY	Pertanahan	10 Nov. 2022	173/B/2022/PT.TUN.SBY	27 hari	Minutasi Tgl. : 07 Des. 2022
188	TUN DENPASAR	Pembanding : Andi Lahab BrawijayaRahmawatiUmayyahTerbanding : SANTORINAWAWIHUSNI SUSANTOBURHANUDINLATIFMUHAJIRNIMISBAHA RISDIANTOKEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA	eCourt 12/G/2022/PTUN. DPS	Pertanahan	11 Nov. 2022	174/B/2022/PT.TUN.SBY	27 hari	Minutasi Tgl. : 08 Des. 2022
189	TUN KUPANG	Pembanding : BUPATI KUPANGTerbanding : Dedyanto Tahik	eCourt 19/G/2022/PTUN. KPG	Lain-Lain	15 Nov. 2022	175/B/2022/PT.TUN.SBY	17 hari	Minutasi Tgl. : 02 Des. 2022
190	TUN KUPANG	Pembanding : BUPATI TIMOR TENGAH SELATANTerbanding : SIMON PETRUS TANAEM	eCourt 12/G/2022/PTUN. KPG	Lain-Lain	15 Nov. 2022	176/B/2022/PT.TUN.SBY	22 hari	Minutasi Tgl. : 07 Des. 2022
191	TUN SURABAYA	Pembanding : ERWIN HAMONANGANTerbanding : Walikota Kota Pasuruan	eCourt 51/G/2022/PTUN. SBY	Kepegawaian	16 Nov. 2022	177/B/2022/PT.TUN.SBY	23 hari	Minutasi Tgl. : 09 Des. 2022
192	TUN SURABAYA	Pembanding : HERMAN S.SyTerbanding : Kepala Desa Badur	eCourt 85/G/2022/PTUN. SBY	Kepegawaian	17 Nov. 2022	178/B/2022/PT.TUN.SBY	34 hari	Minutasi Tgl. : 21 Des. 2022

193	TUN SEMARANG	Pembanding : SoekarmoTerbanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KaranganyarKepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	eCourt 35/G/2022/PTUN. SMG	Pertanahan	28 Nov. 2022	179/B/2022/PT.TUN.SBY	17 hari	Minutasi Tgl. : 15 Des. 2022
194	TUN KUPANG	Pembanding : Bupati Manggarai BaratTerbanding : PT. PRIMA PRATAMA CITRA	eCourt 13/G/2022/PTUN. KPG	Lain-Lain	29 Nov. 2022	180/B/2022/PT.TUN.SBY	16 hari	Minutasi Tgl. : 15 Des. 2022
195	TUN DENPASAR	Pembanding : HARTONO, SHTerbanding : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNGMENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia	eCourt 13/G/2022/PTUN. DPS	Pertanahan	29 Nov. 2022	181/B/2022/PT.TUN.SBY	23 hari	Minutasi Tgl. : 22 Des. 2022
196	TUN MATARAM	Pembanding : ACUS RUDYTO ADHYPRANATATerbanding : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWAHAYADINI NYOMAN WARSA	eCourt 26/G/2022/PTUN. MTR	Pertanahan	29 Nov. 2022	182/B/2022/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasi Tgl. : 27 Des. 2022
197	TUN MATARAM	Pembanding : Juniardi Akhir PutraTerbanding : Bupati Sumbawa	eCourt 32/G/2022/PTUN. MTR	Kepegawaian	01 Des. 2022	183/B/2022/PT.TUN.SBY	22 hari	Minutasi Tgl. : 23 Des. 2022

Dari uraian dan gambar diatas dapat dilakukan perhitungan pencapaian kinerja untuk indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebagai berikut :

$$\frac{197 \text{ (jml. perkara yang diselesaikan tepat waktu)}}{197 \text{ (jml. perkara yang diselesaikan)}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka target untuk pengukuran indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebesar 100% telah tercapai, sehingga capaian untuk kinerja indikator ini sebesar **111,11%**.

**Tabel 8.1**  
Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu  
di Th. 2020 s/d 2022

No	Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
1.	2020	TUN	265	100%	100%	100%
2.	2021	TUN	248	100%	100%	100%
3.	2022	TUN	197	90%	100%	111,11%

**b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Pada indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi, pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.

Berdasarkan data dari tingkat pertama di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selama tahun 2022 perkara yang mengajukan upaya hukum, tergambar dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 8.2**  
Rekapitulasi Perkara Yang Mengajukan Kasasi Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Jumlah
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	42
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	12
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	0
4.	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	8
5.	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	9
6.	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	16
	<b>Jumlah Total</b>	<b>87</b>

Dari tabel diatas, terlihat bahwa perkara yang mengajukan Kasasi sebanyak 87 perkara.

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tahun 2022 sebanyak 197 perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak **110 perkara**.

Jika dilakukan pengukuran terhadap indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$\frac{110}{197} \times 100\% = 55,84\%$$

Dari pengukuran diatas, didapat sejumlah 55,84% untuk realisasi indikator ini, sehingga jika dihitung capaian dari indikator ini adalah sebesar **124,09%**.

Jumlah sebesar 55,84% jika dibandingkan dengan target 45% tentunya melebihi mencapai target yang diharapkan, namun demikian indikator ini **perlu dikaji ulang**, karena pengajuan upaya hukum Kasasi maupun PK oleh pihak yang berperkara tentunya berkaitan dengan kepuasan para pihak atas putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan. Kepuasan para pihak tentunya berkaitan dengan rasa keadilan atas hasil putusan yang diterima, karena para pihak berhak merasa tidak puas dan tidak adil atas putusan Pengadilan. Untuk bisa menakar adil atau tidaknya suatu putusan, tentunya butuh kajian mendalam mengenai materi perkaranya, dan hal ini butuh waktu yang panjang.

Oleh karena itu, capaian indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebesar **62,94%** tidak serta merta mengindikasikan kinerja yang buruk atau baik dalam memutus dan menyelesaikan perkara.

**Tabel 8.3**

Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Th. 2020 s/d 2022

No	Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Target	Realisasi	Capaian
1.	2020	TUN	101	80%	38,11%	47,63%
2.	2021	TUN	137	80%	55,24%	69,05%
3.	2022	TUN	124	45%	55,84%	124,09%

**c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan**

Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diperoleh dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditayangkan di website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sebagaimana tabel berikut :

No.	Periode	Nilai IKM	Keterangan
1	Januari – Maret 2022	90,00%	Triwulan I
2	April – Juni 2022	89,75%	Triwulan II
3	Juli– September 2022	89,75%	Triwulan III
4	Oktober – Desember 2022	84,44%	Triwulan IV
	Rata-rata pertriwulan	88,48%	

**Gambar 2**

Capture di website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



## 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

**Tabel 9**

Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim kepada para pihak / Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%	100%	111,11%

### a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim kepada para pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Perbandingan Jumlah Salinan Putusan Tingkat Banding Yang Dikirim Tepat Waktu dengan Jumlah Putusan adalah cara pengukuran indikator ini.

Dari keseluruhan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2022 sejumlah 197 perkara telah dikirim ke Pengadilan Pengaju secara tepat waktu. Pengukuran indikator ini dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\frac{197}{197} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan pengukuran diatas target 100% untuk indikator Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu telah tercapai.

Dengan diberlakukannya E-Court, pengiriman dilakukan secara digital melalui Aplikasi SIPP. Pemanfaatan Teknologi Informasi ini membantu mempercepat penyampaian salinan putusan ke Pengadilan Pengaju sehingga tepat waktu. Berikut bukti Screenshoot pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju melalui Aplikasi SIPP :

**Gambar 3**  
Bukti Pengiriman Salinan Putusan Secara Digital di Aplikasi SIPP

#	Asal Pengadilan	Nama Pemohon Banding	Nomor Perkara TLJ	Jenis Perkara	Tgl Register	Nomor Perkara Banding	Lama Proses	Status Perkara TK Banding	Link
51	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : Lurah Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya Terbanding : Sulaiman Rajid, SR	eCourt 96/G/2022/PTUN.SBY	Pertanahan	03 Nov. 2022	171/B/2022/PT.TUN.SBY	27 hari	Minutasi tanggal: 30 Nov. 2022	
52	TATA USAHA NEGARA KURANG	Pembanding : YOURY YOHANIS TELHELONG Terbanding : BURATI KURANG YULIANUS LATOTO PRATEA PERSELESIAN KEPALA DESA OEMATNUNU TAHUN 2021	eCourt 11/G/2022/PTUN.KPG	Lain-Lain	02 Nov. 2022	170/B/2022/PT.TUN.SBY	26 hari	Minutasi tanggal: 08 Des. 2022	
53	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : SUGIANTO Terbanding : BURATI ISAMBER	eCourt 76/G/2022/PTUN.SBY	Lain-Lain	01 Nov. 2022	168/B/2022/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasi tanggal: 30 Nov. 2022	
54	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : HERI HARIYANTO Terbanding :	eCourt 77/G/2022/PTUN.SBY	Lain-Lain	01 Nov. 2022	169/B/2022/PT.TUN.SBY	31 hari	Minutasi tanggal: 02 Des. 2022	

Dari salah satu bukti gambar diatas, setelah perkara putus hingga diminutasi dengan tidak melebihi waktu 3 bulan penyelesaian perkara sesuai surat SEMA No. 2 Tahun 2014, maka berkas perkara langsung dikirim ke pengadilan pengaju. Untuk itu, target indikator Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu sebesar 100% telah terpenuhi untuk keseluruhan perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di

tahun 2022 sejumlah 197 perkara (100%). Sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar **100%**.

**Tabel 9.1**

Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu di Th. 2020 s/d 2022

No	Tahun	Jenis Perkara	Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Ke Pengadilan Pengaju	Target	Realisasi	Capaian
1.	2020	TUN	265	100%	100%	100%
2.	2021	TUN	248	100%	100%	100%
3.	2022	TUN	197	90%	100%	111,11%

Sasaran Strategis 3 dan 4 yaitu Peningkatan Kualitas SDM dan Peningkatan Kualitas Pengawasan merupakan sasaran strategis tambahan yang menjadi prioritas untuk ditetapkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selain Sasaran Strategis point 1 dan 2 yang sudah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

### 3. Peningkatan Kualitas SDM

**Tabel 10**

Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3			
Peningkatan Kualitas SDM			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
• Persentase Pembinaan ke Daerah	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja			100%

- **Persentase Pembinaan ke Daerah**

Pengukuran indikator Persentase Pembinaan ke Daerah adalah terlaksananya Pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ke satuan kerja di wilayah hukumnya.

Kegiatan pembinaan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan. Secara formalnya, dilakukan oleh pimpinan pada forum rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai). Pada forum tersebut dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan tugas seluruh komponen dan teguran-teguran oleh pimpinan terhadap beberapa kekurangan dan penyimpangan yang terjadi.

Pembinaan secara informal baik melalui media social seperti grup WhatsApp, juga dilakukan oleh pimpinan dan tiap-tiap bagian di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ke seluruh satker di daerah terkait sosialisasi peraturan maupun kebijakan pimpinan dan Mahkamah Agung RI.

Untuk Tahun Anggaran 2022 ini, Pembinaan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ke seluruh satuan kerja di daerah, dengan rincian kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/613/PS.03/4/2022 tanggal 08 April 2022 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**, yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 April 2022;
2. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/613/PS.03/4/2022 tanggal 08 April 2022 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**, yang dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 22 April 2022;
3. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/601/PS.03/4/2022 tanggal 8 April 2022 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar**, yang dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 28 April 2022;
4. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/764/PS.03/5/2022 tanggal 12 Mei 2022 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang**, yang dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 Mei 2022;
5. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/779/PS.03/5/2022 tanggal 23 Mei 2022 telah dilaksanakan



pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**, yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 8 Juni 2022;

6. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/945/PS.03/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram**, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s/d 2 November 2022;

#### Gambar 4

Foto Salah Satu Kegiatan Pembinaan di Tahun 2022



**Tabel 10.1**

Capaian Persentase Pembinaan ke Daerah di Th. 2020 s/d 2022

No	Tahun	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	2020	Pembinaan ke Satker Daerah	100%	100%	100%
2.	2021	Pembinaan ke Satker Daerah	100%	100%	100%
3.	2022	Pembinaan ke Satker Daerah	100%	100%	100%

**4. Peningkatan Kualitas Pengawasan**

**Tabel 11**

Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4					
Peningkatan Kualitas Pengawasan					
Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti		100%	100%	100%
b.	Persentase Pengawasan ke Daerah		100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%

**a. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti**

Untuk indikator kinerja Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti ini, pengukurannya didasarkan pada terlaksananya tindak lanjut pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Selama tahun 2022, tidak ada laporan pengaduan yang masuk atau diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana tergambar dalam laporan di bawah ini :

**Gambar 5**

Laporan Tahunan Penanganan Pengaduan

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
Jalan Kelintang Madya VI No. 2 Surabaya  
Telf/Fax : (031) 8221134-828822  
Kotak Pos : 21553, 803-Kode Pos : 60232  
SURABAYA

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
BULAN JANUARI – DESEMBER 2022

NO.	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	JOHANIS SAIYA	Permohonan revisi Putusan Gugatan Nomor : 117/S/2021/PTUN.SBY	17 Januari 2022	Telah diadakan Pemeriksaan berupa Klarifikasi terhadap Terlapor.	LHP Klarifikasi telah disampaikan kepada Pelapor
2.	IWAN SANTOSO, S.H.	Mohon peradilan adanya informasi mengenai/mengembalikan perkara banding No. 150/B/2022/PTUN.SBY di PT TUN Surabaya	21 Oktober 2022	Pemanggilan Para Terlapor untuk dimintai keterangan/klarifikasi	Ditindak lanjut

Mengetahui :  
Ketua  
*[Signature]*  
Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.  
NIP.19571011 198503 1 001.

Surabaya, 30 Desember 2022.  
Panitera,  
*[Signature]*  
Drs. SAMPIRIN HADI S, S.H.,M.H.  
NIP.19611008 198503 1 006.

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa ada 2 (dua) pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan sudah ditindaklanjuti. Dengan demikian, capaian untuk indikator Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti telah terpenuhi sebesar **100%**.

**Tabel 11.1**  
Capaian Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Th. 2020 s/d 2022

No	Tahun	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	2020	Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	NIHIL	100%
2.	2021	Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	NIHIL	100%
3.	2022	Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

**b. Persentase Pengawasan ke Daerah**

Untuk indikator Persentase Pengawasan ke Daerah, pengukuran capaiannya didasarkan pada terlaksananya kegiatan Pengawasan ke satker se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Untuk Tahun Anggaran 2022 ini, Pengawasan Kesekretariatan maupun Kepaniteraan oleh Hakim Pengawas Daerah telah dilaksanakan dengan baik. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

**Pengawasan Bidang Kepaniteraan :**

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/799/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang**, yang dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 10 Juni 2022;
2. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/800/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram**, yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 Juni 2022;
3. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/803/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**, yang dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 01 Juli 2022;

4. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/801/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**, yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 8 Juli 2022;
5. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/802/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**, yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Juli 2022;
6. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/804/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar**, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2022;

**Pengawasan Bidang Kesekretariatan :**

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/816/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang**, yang dilaksanakan pada tanggal 08 s/d 10 Juni 2022;
2. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/814/PS.04/6/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar**, yang dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 15 Juni 2022;
3. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/815/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram**, yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 Juni 2022;
4. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1019/PS.04/6/2022 tanggal 28 Juni 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni s/d 1 Juli 2022;
5. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/811/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**, yang dilaksanakan pada tanggal 07 s/d 08 Juli 2022;

6. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/812/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**, yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Juli 2022;

Dari uraian diatas, maka capaian untuk indikator Persentase Pengawasan ke Daerah telah terpenuhi sebesar **100%** sesuai yang ditargetkan.

**Gambar 6**

Salah Satu Foto Kegiatan Pengawasan di Tahun 2022



**Tabel 11.2**

Capaian Persentase Pengawasan Th. 2020 s/d 2022

No	Tahun	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	2020	Pengawasan ke Daerah	100%	100%	100%
2.	2021	Pengawasan ke Daerah	100%	100%	100%
3.	2022	Pengawasan ke Daerah	100%	100%	100%

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersumber dari dana APBN yang digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh 2 (dua) DIPA, dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut :

### 1. DIPA NOMOR : SP DIPA-005.01.2.548940/2022 TGL. 17 NOVEMBER 2021

Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 17.526.470.000,- (Tujuh belas milyar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp. 17.383.029.356,- (Tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 99,18%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2022 mengalami *peningkatan*. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 12**  
Realisasi Anggaran DIPA 01 Th. 2020 s/d 2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	13.757.241.000,-	13.443.184.103,-	97,89
2	2021	16.301.159.000,-	15.953.185.348,-	97,87
3	2022	17.526.470.000,-	17.383.029.356,-	99,18

### 2. DIPA NOMOR : SP DIPA-005.05.2.548941/2022 TGL. 17 NOVEMBER 2021

Anggaran DIPA 05 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 240.379.000,- (Dua ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 227.721.670,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 94,73%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada

tahun 2021 mengalami **peningkatan**. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 13**  
Realisasi Anggaran DIPA 05 Th. 2020 s/d 2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	250.441.000,-	210.128.808,-	83,90
2	2021	297.000.000,-	249.610.000,-	84,04
3	2022	240.379.000,-	227.721.670,-	94,73

Dari realisasi kedua DIPA tersebut diatas merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 14**  
Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	240.379.000,-	227.721.670,-	94,73
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	240.379.000,-	227.721.670,-	94,73



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya yang telah disusun ini, merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Laporan ini memberikan informasi Pencapaian Kinerja selama tahun 2022 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Hal ini diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk meningkatkan kinerjanya.

### B. SARAN

1. Diperlukan peningkatan kinerja yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta peningkatan pelayanan terhadap para pencari keadilan agar terpenuhi kepuasan para pencari keadilan serta kemudahan dalam menjangkau badan peradilan;
2. Sinergitas setiap unit dan bagian di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam usaha meningkatkan kinerja dan pelayanan internal dan eksternal;
3. Optimalisasi penyusunan dan pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan tahun berikutnya;
4. Perlu adanya evaluasi dalam pengukuran untuk indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.





## LAMPIRAN

1. Penghargaan
2. Inovasi
3. SK Pembentukan Tim Penyusun LKjIP
4. Reviu Indikator Kinerja Utama
5. Rencana Strategis Tahun 2020-2024



## PENGHARGAAN

Penghargaan yang di peroleh tahun 2022 :

1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu, predikat "A" (Excellent)



2. Peringkat 4 Pengadilan Tinggi Peradilan Tata Usaha Negara dengan Jumlah Satker Peraih Anugerah Terbanyak





## INOVASI

Inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya :

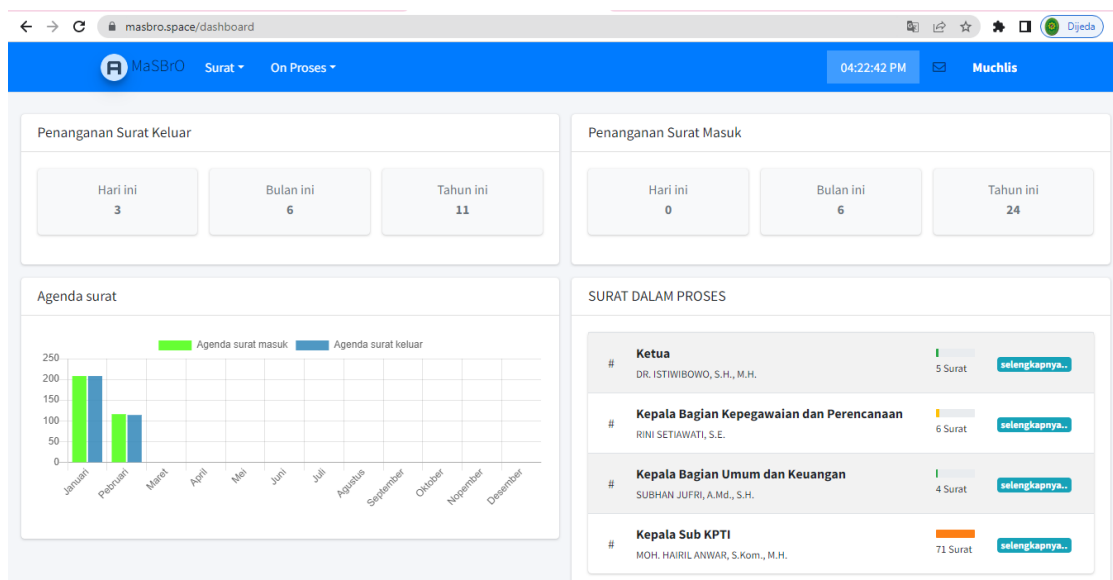
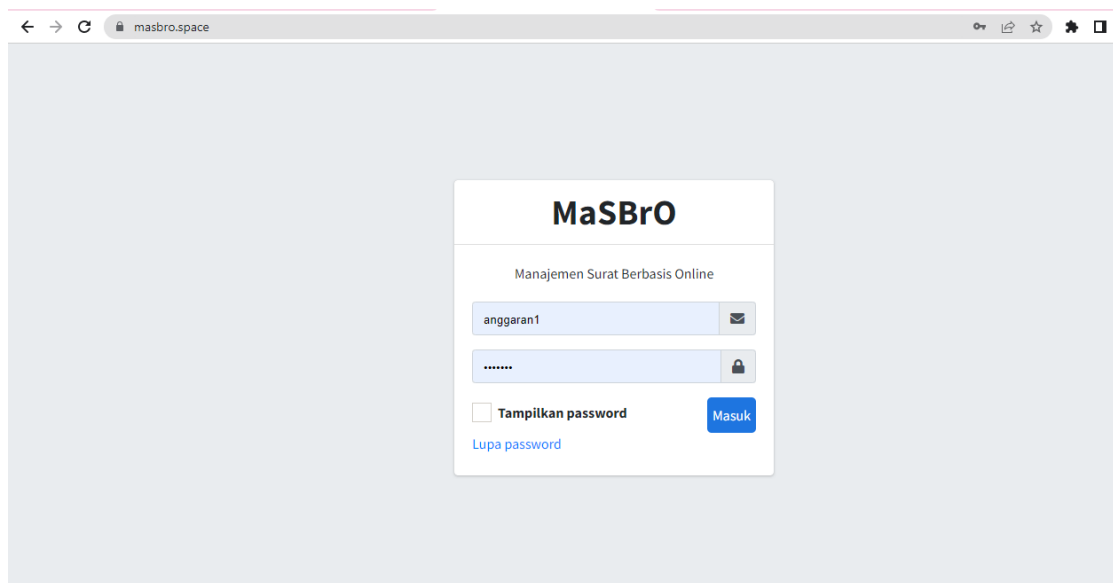
1. Aplikasi SIRATUS (Sistem Informasi Perkara Putus)

Aplikasi yang bertujuan memudahkan pencari keadilan memperoleh informasi data perkara yang telah diputus dapat diakses melalui website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ([www.pttun-surabaya.go.id](http://www.pttun-surabaya.go.id)).



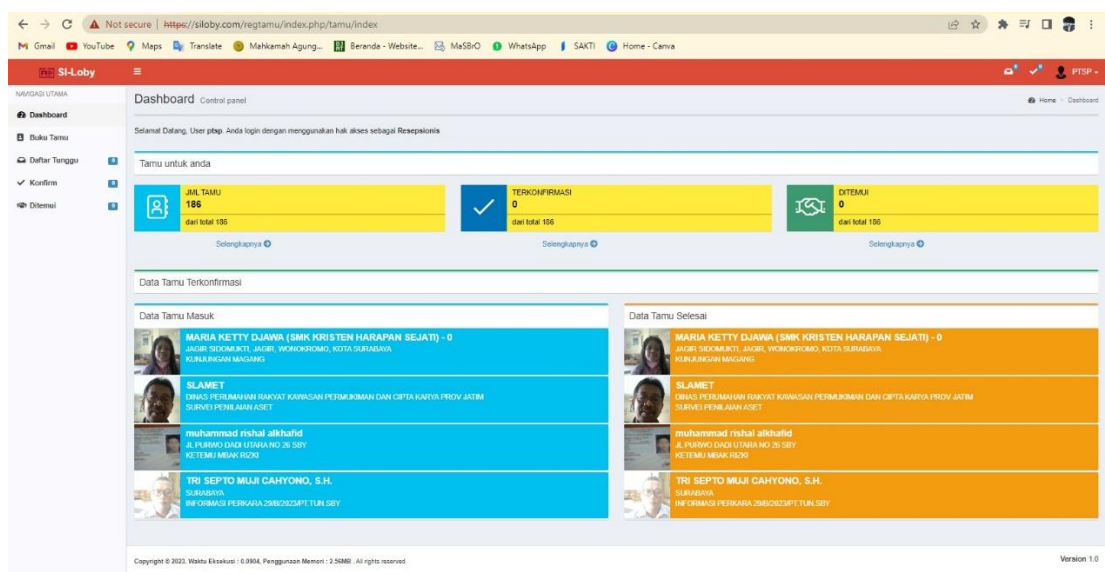
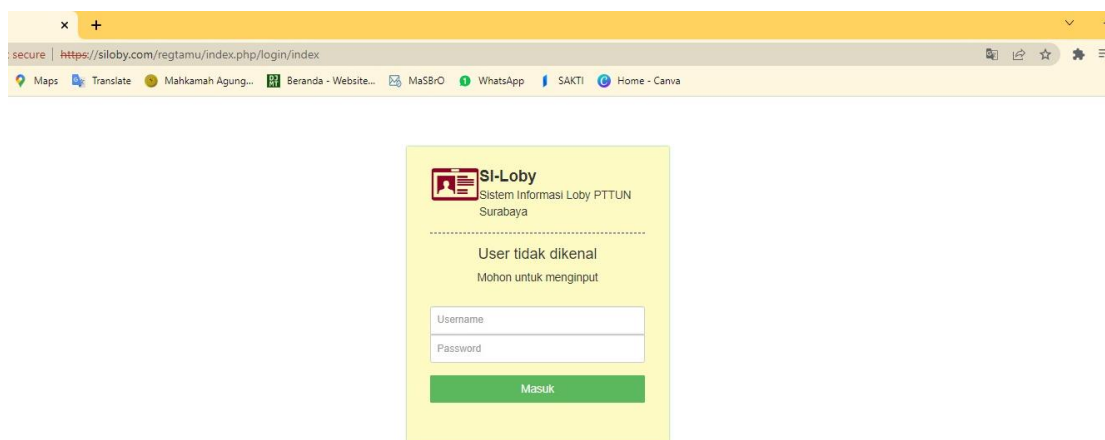
## 2. Aplikasi MasBro (Manajemen Surat Berbasis Online)

Bentuk inovasi persuratan menggunakan perkembangan teknologi informasi berbasis aplikasi web, digunakan untuk mempermudah pelayanan kepada pengguna mulai dari Ketua, sampai ke end user yaitu para pelaksana bagian surat di sub bagian di kesekretariatan dan panitera muda pada bidang kepaniteraan. Inovasi MaSBrO ini mengurangi jumlah kertas yang dikonsumsi, karena mengurangi penggunaan buku agenda surat yang biasanya akan mudah terkena resiko rusak atau hilang.



### 3. Si Lobby (Sistem Informasi Lobby)

Inovasi penggunaan layanan penerimaan tamu sebagai fasilitas untuk mempermudah pendataan tamu yang datang ke kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan dikendalikan oleh petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang berada di lobby disambut dengan ramah dan didata dari mulai nama, domisili, foto tamu, kartu tanda pengenal untuk memudahkan pelacakan jika ada kepentingan lebih lanjut untuk mudah dihubungi Kembali. SiLoby ini juga merupakan teknologi paperless atau mengurangi jumlah konsumsi kertas di kantor, sehingga memberi kesan ramah lingkungan karena menghilangkan sampah kertas yang biasanya digunakan dalam pemakaian kertas atau buku.





PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
NOMOR : W3-TUN/ 241 /PR.01/2/2023**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data / informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada masing-masing Tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 02 Februari 2023

Ketua


Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.  
NIP. 19571011 198503 1 001



**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

---

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H. NIP. 19571011 198503 1 001
2.	Koordinator Validasi Data	Dr. DISIPLIN. F. MANAO, S.H., M.H. NIP. 19610712 198803 1 006
3.	Ketua	Drs. SAMPIRIN HADI S, S.H., M.H. NIP. 19611008 198503 1 006
4.	Sekretaris	MOCH MUCHLIS, S.H. NIP. 19721003 200604 1 002
5.	Anggota	1. EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H. NIP. 19750907 200003 1 002
		2. MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. NIP. 19640204 198603 1 005
		3. OKI KAMESHWARA ISKANDAR, A.Md. S.H.,M.H. NIP. 19750422 200012 1 002
		4. JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H. M.H. NIP. 19700130 199303 2 002
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. MARDIUS SEPTIADI, S.H. NIP. 19720912 199203 1 001
		2. RINI SETIAWATI, S.E. NIP. 19750929 200604 2 002
		3. SUBHAN JUFRI, A. Md., S.H. NIP. 19760730 200003 1 001
		4. MAULANA BINTANG BAHARI, S.A.P. 19950527 201903 1 004

Ketua  
  
Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.  
NIP. 19571011 198503 1 001

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

---

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing- masing Unit Eselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ketua  
  
Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.  
NIP. 19571011 198503 1 001



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
NOMOR : W3-TUN/312 /PR.01/1/2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
  - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  - 6. Peraturan Presiden Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
  - 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Keoaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indkator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Hasil rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA.**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu – isu strategis Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 4 Januari 2023

-----  
Ketua  
  
Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.  
NIP. 19571011 198503 1 001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan</li> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan di banding tahun berjalan.</li> <li>Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Persepsi Kepuasan stakeholder</div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> <li>• Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.</b>	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak/Pengadilan Pengajuan Pengaju tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan yang dikirim}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan.</li> <li>• Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan : di Surabaya  
 Pada Tanggal : 04 Januari 2023  
 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



Dr. ISTIWIBOWO, SH., MH.  
 NIP. 19571011 198503 1 001

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

**VISI** : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yang Agung

- MISI** :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
  2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
  4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
  5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Rp.
														Jml	Sat	
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Pemberian Standar Pelayanan Minimal bagi Pencari Keadilan serta SDM Tenaga Teknis yang Mumpuni (Berkualitas)	1	KGT	173.600.000

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Rp.
														Jml	Sat	
				b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	90%	90%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	250	Perkara	173.600.000	
				c. Persentase Penurunan sisa perkara	80%	80%	80%	80%	80%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	250	Perkara	173.600.000	
				d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%	80%	45%	45%	50%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	250	Perkara	173.600.000	



No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Rp.
														Jml	Sat	
2.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	90%	90%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	250	Perkara	173.600.000
		Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus			b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	250	Perkara	173.600.000

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Rp.
														Jml	Sat	
3.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase Pembinaan ke Daerah		Peningkatan Kualitas SDM	Persentase Pembinaan ke Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Program Dukungan Manajemen	1. Peningkatan Manajemen TUN 2. Pembinaan Adm. & Pengel. Keuangan BUA	1. Koordinasi 2. Layanan Perkantoran	2	Lynn	173.600.000 13.561.572.000
4.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti		Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen TUN	Koordinasi	1	Layanan	173.600.000

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Rp.
														Jml	Sat	
		Persentase Pengawasan ke daerah			b. Persentase Pengawasan ke daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Program Dukungan Manajemen	1. Peningkatan Manajemen TUN 2. Pembinaan Adm. & Pengel. Keuangan BUA	1. Koordinasi 2. Layanan Perkantoran	2	Layanan	173.600.000 13.561.572.000